

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 – 2021 (Versi Revisi)



**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KAB.TANJUNG JABUNG BARAT - PROV.JAMBI**

Jalan Prof.Dr.Sri Soedewi Maschun Sofyan, SH Kuala Tungkal 36512
Phone/Fax : (0742) 7351051 Email : disbunnaktanjabbarat@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 ini adalah penjabaran dari *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)* Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis (**Renstra**) adalah gambaran arah kebijakan **Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat** yang akan menjadi acuan dalam menyusun Program dan Kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2016-2021.

Tersusunnya **Rencana Strategis** ini diharapkan akan terciptanya perencanaan yang baik dan terarah dalam pembangunan Sektor **Perkebunan dan Peternakan** di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, juga diharapkan akan mampu mengantisipasi dan menjawab tantangan **Dinamika Pembangunan** Perkebunan dan Peternakan dimasa mendatang serta mampu memenuhi kebutuhan perkembangan **IPTEK dan Isu Global** yang menjadi komitmen pembangunan nasional.

Kuala Tungkal,

2018

**Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung jabung Barat**

Ir. Melam Bangun

Pembina Utama Muda

NIP. 19611215 199303 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Strategis (*Renstra*) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang disusun secara rinci oleh satuan kerja perangkat daerah untuk jangka waktu 5 Tahun, yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam rencana kerja SKPD setiap tahun yang terintegrasi melalui program dan kegiatan guna pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan prinsip kebutuhan, keterpaduan dan berkelanjutan, maka penyelenggaraan pembangunan sektor peternakan dituangkan dalam Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 pada prinsipnya tetap melanjutkan kebijakan prioritas pembangunan sektor Perkebunan dan Peternakan sebelumnya. Kesenambungan penetapan sasaran pembangunan Perkebunan dan Peternakan merupakan penjabaran dari program prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

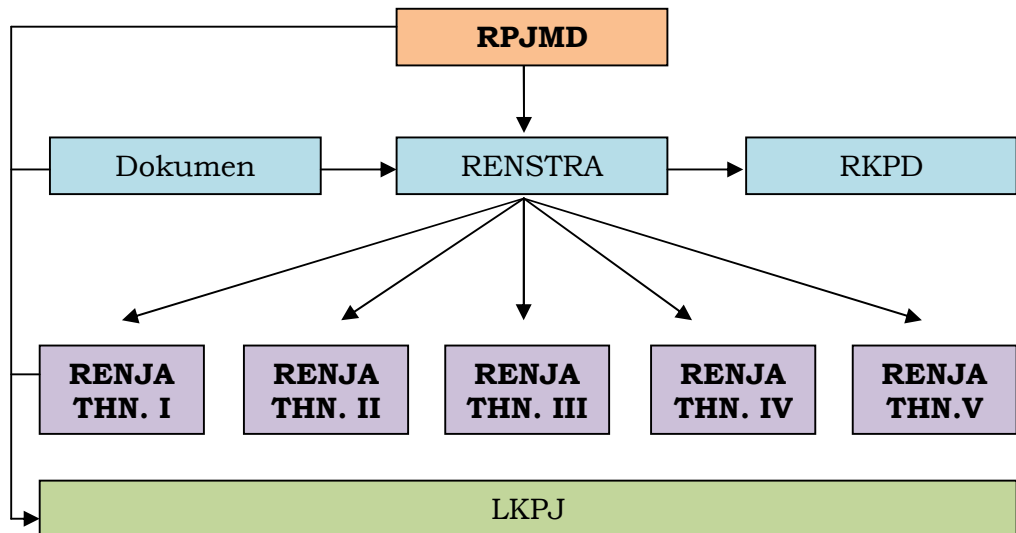
Rencana Strategis (*Renstra*) merupakan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang responsive dalam jangka panjang terhadap kondisi yang dihadapi daerah, berorientasi kedepan dan berupaya membangun masyarakat berbasis perspektif kebutuhan daerah, dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan

ancaman (*threats*) yang ada. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta bersifat indikatif.

Renstra Satuan Kerja merupakan Dokumen Perencanaan yang menjabarkan isu-isu permasalahan strategis pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta program-program strategis yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana, bertahap dan mempunyai tolak ukur serta target pencapaian kinerja yang jelas melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan turunan/ penjabaran lebih lanjut dari **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan merupakan Pedoman Perencanaan bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan maupun rencana unit pelaksana teknis yang ada dibawah Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam implementasinya maka proses penyusunan Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* melalui proses yang transparan, demokratis, terpadu dan akuntabel. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai

tujuannya. Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar berikut ini :



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra

Renstra ini merupakan Dokumen Perencanaan Strategis untuk menjabarkan potret permasalahan pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti yang telah dituangkan dalam indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dan APBN. Oleh karenanya, landasan penyusunan Renstra Pembangunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58,
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan RPJMD dan RPJPD dan Renja Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015-2025;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
 - 23) Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 24) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 - 25) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat;
 - 26) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/909/Bappemdal/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Perkebunan Kab.Tanjung Jabung Barat;
 - 27) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/ /Bappemdal/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/ /Bappemdal/2017 Tentang Pengesahan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Revisi RPJMD) Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud.

Maksud penyusunan Rencana Strategis (**Renstra**) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 ini disusun sebagai acuan resmi bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, swasta, dan masyarakat umum dalam pembangunan bidang Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program/kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

b. Tujuan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (**Renstra**) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 :

1. Menjabarkan secara umum kondisi sektor Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021;
2. Memberi arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan bidang Perkebunan dan Peternakan tahun 2016-2021;

3. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021 disusun dengan *Sistematika Penulisan* sebagai berikut :

**HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI**

BAB I. PENDAHULUAN.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- 3.3. Telaah Renstra K/L.
- 3.4. Telaah RTRW Tanjung Jabung Barat dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentunya diserahkan pada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang menegaskan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah kabupaten di bidang Perkebunan dan Peternakan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Menyusun rencana strategi dan akuntabilitas kinerja dinas;
- b. Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis dilingkungan dinas Peternakan;
- c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas;
- e. Membina **Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)**; dan
- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Kepala Dinas
2. 1 (satu) orang Sekretaris
3. 4 (empat) orang Kepala Bidang
4. 15 (lima belas) orang Kasi

Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
- c. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:

1. Seksi Lahan dan Irigasi.
 2. Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin.
 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- d. Bidang Perkebunan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
1. Seksi Perbenihan
 2. Seksi Produksi
 3. Seksi Perlindungan
- e. Bidang Peternakan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
1. Seksi Pembibitan dan Produksi.
 2. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- f. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
1. Seksi Penyuluhan.
 2. Seksi Pengolahan.
 3. Seksi Pemasaran.
- g. **Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)**, terdiri dari :
1. UPTD Lab. Hayati
 2. UPTD Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu
 3. UPTD Kecamatan Bram Itam
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Kabupaten di bidang perkebunan dan peternakan;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana strategi dan akuntabilitas kinerja dinas;
 - b. Menyiapkan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis dilingkungan dinas Perkebunan dan Peternakan;
 - c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas;
 - e. Membina Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas (UPTD) dan;
 - f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang kesekretariatan
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategi dan akuntabilitas kinerja dinas;

- b. Melaksanakan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. Menginventarisir permasalahan dan solusi pemecahannya terkait lingkup tugas;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas;
- f. Mengkoordinasikan tugas dan kegiatan bidang-bidang dan
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

BIDANG PRASARANA DAN SARANA

1. Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana perkebunan dan peternakan.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang prasarana dan sarana;
 - b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan potensi, pengelolaan lahan, irigasi perkebunan dan peternakan;

- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, perhitungan penyediaan, pengawasan peredaran dan pendaftaran serta penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat mesin perkebunan, peternakan;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pengembangan, pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan, tata cara usaha perkebunan dan peternakan, bantuan permodalan, rekomendasi perizinan perkebunan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Lahan dan Irigasi

Seksi Lahan dan Irigasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Dan Seksi Lahan dan Irigasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup pengelolaan lahan dan irigasi.
- (2) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi lahan dan irigasi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan dan

- penyediaan lahan, jalan usaha tani, jaringan irigasi lahan Perkebunan dan Peternakan;
- c. Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan Perkebunan dan Peternakan;
 - d. Melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi Perkebunan dan peternakan; dan
 - e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penghitungan, pengawasan perendaran, penjaminan mutu, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan dan peternakan.

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin;

- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan dan peternakan;
- c. Melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan dan peternakan;
- d. Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran serta pemjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin serta dan peternakan;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Perkebunan dan peternakan; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Pembiayaan dan Investasi.

- (1) Seksi Pembiayaan dan Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pembiayaan dan Investasi dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan pendampingan dan supervisi, tatacara usaha, rekomendasi perizinan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup pembiayaan dan investasi perkebunan dan peternakan;

Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi pembiayaan dan investasi;
- b. Melakukan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembiayaan dan investasi, bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi serta fasilitasi pelayanan investasi perkebunan dan peternakan;
- c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan pembiayaan dan investasi di bidang perkebunan dan peternakan ;
- d. Melakukan pemberian informasi dan rekomendasi tata cara usaha perkebunan dan peternakan dan bantuan permodalan di bidang perkebunan dan peternakan ;
- e. Melaksanakan tata cara usaha, pemberian izin/rekomendasi teknis dibidang perkebunan dan peternakan;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan pembiayaan dan investasi di bidang perkebunan dan peternakan;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugasnya.

BIDANG PERKEBUNAN

(1) Bidang Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan.

Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perkebunan;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi perbenihan perkebunan, pengujian mutu benih, sertifikasi benih, pengendalian sumber benih, perencanaan kebutuhan benih dan pengembangan varitas unggul, bimbingan teknis perbenihan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi rencana tanam dan produksi, bimbingan peningkatan mutu dan produksi, penerapan teknologi budidaya perkebunan dan bimbingan pasca panen serta pemasaran hasil perkebunan;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyediaan dan pengawasan penggunaan benih, pengendalian dan pengamatan OPT, bimbingan kelembagaan OPT,

penanggulangan bencana, pencegahan dan perlindungan perkebunan; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perbenihan.

(1) Seksi Perbenihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Perbenihan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan, pengujian, sertifikasi benih, pengendalian sumber benih, merencanakan kebutuhan benih, pengembangan vaeritas unggul pemberian bimbingan produksi benih, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkup perbenihan perkebunan.

Seksi Perbenihan mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi perbenihan;
- b. Melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengawasan, pengujian mutu benih, sertifikasi benih, pengendalian sumber benih, merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas unggul di bidang perkebunan;
- c. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar dibidang perkebunan;
- d. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan Pengolahan di bidang Perkebunan;

- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan pelaporan serta pendokumentasian kegiatan seksi perbenihan perkebunan; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Produksi.

(1) Seksi Produksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan anggaran, penyiapan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup produksi perkebunan.

Seksi Produksi mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi produksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perkebunan.
- c. Melakukan penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan.
- d. Melakukan pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi perkebunan dan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan.
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pendokumentasian kegiatan produksi perkebunan; dan

- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Perlindungan

- (1) Seksi Perlindungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perlindungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, penyediaan dan pengawasan peredaran benih, pengendalian, bimbingan teknis, pengamatan, pengolahan, penanggulangan bencana, pemberian rekomendasi pemantauan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian dilingkup perlindungan.

Seksi Perlindungan mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi perlindungan;
- b. Melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/ penggunaan benih, bahan pengendalian OPT, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT serta pengolahan data OPT bidang Perkebunan;
- c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT dan bahan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu serta bimbingan teknis perlindungan dan Pengolahan Perkebunan;

- d. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam, gangguan kebakaran lahan dan kebun dan gangguan usaha perkebunan;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan perlindungan perkebunan;
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BIDANG PETERNAKAN

- (1) Bidang Peternakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, kebijakan, pelaksanaan, perencanaan kebutuhan, pembinaan bimbingan, pengendalian penyakit, pengawasan peredaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan.

Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana di bidang peternakan;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengendalian, penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak, pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT, pengujian benih/bibit HPT, pengelolaan sumber daya genetik hewan dan pemberdayaan kelompok peternak serta bimbingan produksi ternak;

- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi identifikasi calon lokasi penyebaran ternak dan calon penggaduh ternak, penyusunan kawasan sentra produksi ternak dan kawasan Perkebunan dan Peternakan terpadu, menyusun standard pola gaduhan ternak pemerintah, dan redistribusi ternak serta penilaian ternak;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, pengawasan peredaran obat hewan, pemotongan hewan, penanggulangan penyakit zoonosis, penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembibitan dan Produksi

(1) Seksi Pembibitan dan Produksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Pembibitan dan Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi lingkup perbibitan dan produksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Pembibitan dan Produksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak serta pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT), pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT dan bahan pengujian benih/bibit HPT;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- e. Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak dan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit, dan Produksi Peternakan; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugasnya.

Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak.

- (1) Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian

bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan kawasan ternak, penyiapan lokasi dan peternak, mengelola administrasi gaduhan ternak, penilaian ternak Pemerintah dan redistribusi ternak lingkup Pengembangan dan Penyebaran Ternak.

Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak;
- b. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pengembangan dan Penyebaran Ternak;
- c. Melakukan identifikasi calon lokasi penyebaran ternak dan calon penggaduh ternak;
- d. Melakukan penyusunan kawasan sentra produksi ternak, kawasan Perkebunan dan Peternakan terpadu, penyusunan standard pola gaduhan ternak pemerintah dan mengkoordinasikan lokasi kawasan Perkebunan dan Peternakan terpadu berdasarkan kesepakatan bersama;
- e. Melakukan rencana sarana dukungan kerjasama dengan provinsi dan pusat dalam Pengembangan dan Penyebaran Ternak;
- f. Melaksanakan administrasi gaduhan ternak, pelaksanaan redistribusi ternak dan penilaian ternak pemerintah;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan pendokumentasian kegiatan Pengembangan dan Penyebaran Ternak; dan

- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner.

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner;
- c. Melakukan pemantauan, pengawasan peredaran obat hewan dan mengevaluasi pelayanan kesehatan hewan;
- d. Penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan, bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi

- usaha produk hewan serta mengawasi pelaksanaan pelayanan pemotongan hewan;
- e. Melakukan pengawasan menanggulangi penyakit Zoonosis dan melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pendokumentasian kegiatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ;dan
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BIDANG PENYULUHAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

- (1) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan, pengolahan serta pemasaran perkebunan dan peternakan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rencana pembinaan dan pemberdayaan bagi penyuluhan, pekebunan dan peternakan, penyusunan jadwal penyuluhan, pembinaan lembaga petani, penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi penyuluhan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bimbingan teknis dan pengembangan unit pengolahan hasil, penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil, penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB), pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP);
- d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bimbingan dan pengembangan Pemasaran hasil, promosi produk, pelayanan dan pengembangan informasi pasar Perkebunan dan Peternakan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyuluhan

(1) Seksi Penyuluhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis dan pembinaan serta pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian lingkup penyuluhan perkebunan dan peternakan

Seksi Penyuluhan mempunyai uraian tugas pekerjaan :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi penyuluhan;
- b. Melakukan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- c. Melakukan penyusunan rencana dan jadwal penyelenggaraan penyuluhan, penyiapan pelaksanaan penyebaran materi, metode penyuluhan dan bahan penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi penyuluhan;
- d. Melakukan penyusunan bahan pembinaan dan supervisi penyuluhan perkebunan dan peternakan, pembinaan menumbuh kembangkan lembaga petani dan rencana pembinaan serta pemberdayaan bagi penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan penyuluhan perkebunan dan peternakan; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Pengolahan.

(1) Seksi Pengolahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Pengolahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, penyiapan bahan penyusunan bimbingan dan pengembangan, penerapan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pengolahan hasil di bidang Perkebunan dan Peternakan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengolahan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan Perkebunan dan Peternakan;
- b. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil, dan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang Perkebunan dan peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang Perkebunan dan peternakan ;
- d. melkukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan di bidang Perkebunan dan peternakan;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan Pengolahan di bidang Perkebunan dan peternakan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Seksi Pemasaran.

- (1) Seksi Pemasaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemasaran dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemasaran hasil di bidang Perkebunan dan peternakan.

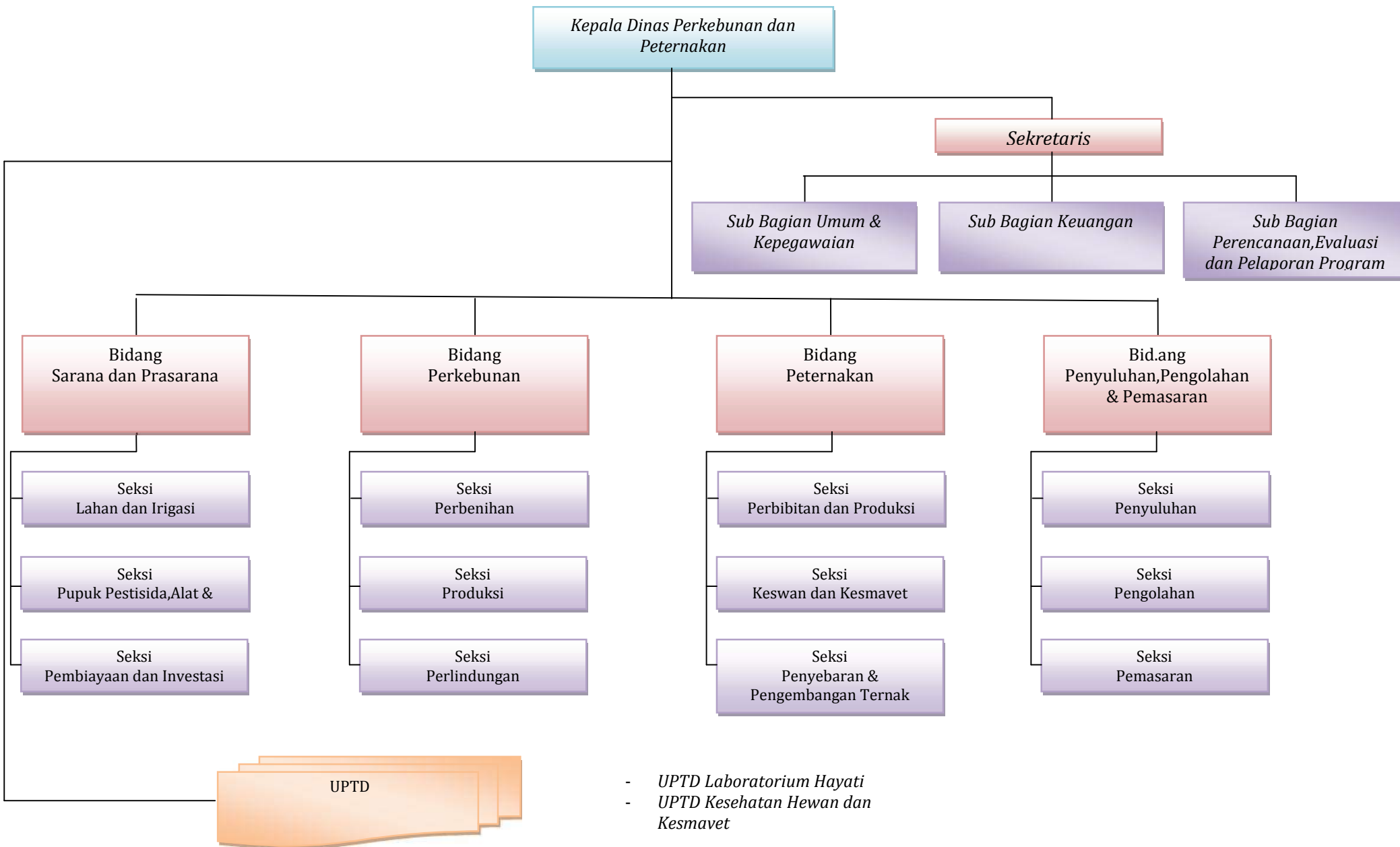
Seksi Pemasaran mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi pemasaran;
- b. melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan Pemasaran hasil Perkebunan dan peternakan;
- c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan Pemasaran dan hasil Perkebunan peternakan, dan pemberian bimbingan teknis pemasaran hasil di bidang Perkebunan dan peternakan;
- d. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang Perkebunan dan peternakan;
- e. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang Perkebunan dan Peternakan ;
- f. melakukan pemantaua, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan pemasaran di bidang Perkebunan dan peternakan; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Kelompok Jabatan fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional pada masing-masing Dinas terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya
2. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas
3. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.



Dalam Rangka mendukung tugas pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik kualitasnya

maupun kuantitas. Selanjutnya Data SDM ASN Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Tabel 2.1 Data ASN Dinas Perkebunan dan Peternakan Berdasarkan Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No	Gol/Ruang	Jumlah	Tingkat Pendidikan			
			SLTA	Diploma	S1	S2
1	2	3	4	5	6	7
1	IV/c	1	-	-	1	-
2	IV/b	3	-	-	3	-
3	IV/a	2	-	-	1	1
4	III/d	13	4	-	9	-
5	III/c	9	2	1	5	1
6	III/b	3	-	-	3	-
7	III/a	2	1	-	1	-
8	II/d	3	3	-	-	-
9	II/c	3	3	-	-	-
10	II/b	4	4	-	-	-
11	II/a	-	-	-	-	-
12	TKK/TKS	36	26	-	9	-
Jumlah total		88	43	1	31	2

Unit Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan



Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai 3 (tiga) unit UPTD masing-masing di *Kecamatan Tungkal Ilir*, *Kecamatan Bram Itam* dan *Kecamatan Tungkal Ulu*. Selain adanya UPTD Dinas Perkebunan dan Peternakan juga mempunyai **Pos Keswan dan IB**.

Untuk pelayanan kesehatan hewan Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 5 (lima) pos keswan, 5 petugas Medis dan 6 petugas para medis yang tersebar di masing-masing Kecamatan. (Tabel 2.2)

Tabel 2.2 Jumlah Petugas Medis dan Paramedis Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Kecamatan	Petugas Medis	Petugas Paramedis	Keterangan
1	Tungkal Ilir	3	1	Medis PNS 3 orang , paramedis Tenaga honorer 1 orang
2	Betara	-	1	-
3	Pengabuan	-	1	PNS
4	Senyerang	-	1	Tenaga Honorer
5	Tungkal Ulu	1	1	Tenaga Honorer
6	Merlung	1	1	Tenaga Honorer
7	Batang Asam	-	1	Tenaga Honorer



Dilihat dari jangkauan lokasi dan medan yang cukup berat jumlah petugas medis dan paramedis masih sangat minim. Untuk optimalnya masing-masing Kecamatan mempunyai 1 (satu) unit pos keswan dan 1 (satu) orang petugas medis dan dibantu 2 orang petugas paramedis.

Untuk meningkatkan populasi dan produktivitas ternak salah satu usaha dengan program inseminasi buatan (IB) dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak baik kualitas maupun kuantitas.



Jumlah Pos IB di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada 11 unit dengan petugas IB sebanyak 12 orang, petugas PKB 8 orang dan petugas ATR 7 orang yang tersebar dimasing-masing Kecamatan (Tabel 2.3)

Tabel 2.3 Jumlah Petugas IB, PKB, ATR dan Recorder di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	KECAMATAN	PETUGAS IB	PETUGAS PKB	PETUGAS ATR
1	TUNGKAL ILIR	-	2	2
2	BRAM ITAM	1	1	1
3	SEBERANG KOTA	-	-	-
4	BETARA	3	-	-
5	KUALA BETARA	-	-	-
6	PENGABUAN	1	1	1
7	SENYERANG	3	1	1
8	TUNGKAL ULU	1	1	1
9	TEBING TINGGI	1	-	-
10	MUARA PAPALIK	1	-	-
11	BATANG ASAM	1	1	-
12	MERLUNG	-	1	1
13	RENAH MENDALUH	-	-	-
TOTAL		12	8	7

Aset/Modal

Adapun Sarana, Prasarana serta Perlengkapan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tercatat sampai dengan *Desember 2017* antara lain :

No	Jenis Klasifikasi Aset		Saldo Per- 31 Desember 2017
I	ASET TETAP		9,347,465,115,-
	1	Tanah	890,453,500,-
	2	Peralatan dan Mesin	3,701,211,572,-
	3	Gedung dan Bangunan	2,805,455,843,-
	4	Jalan Irigasi dan Jaringan	469,399,200,-
	5	Aset Tetap Lainnya	1,459,950,000,-
	6	Konstruksi dalam Pengerjaan	20,995,000,-
II	ASET LAINNYA		3,689,567,900,-
	1	Aset tak Berwujud	-
	2	Aset lainnya	3,689,567,900,-
III	TOTAL ASET INTRACOUNTABLE		13,037,033,015,-
IV	ASET EXTRA COUNTABLE		-
Total Aset Intra + Extra			13,037,033,015,-

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.



Pada tabel. 2.4. di bawah ini terlihat bahwa Capaian Kinerja Bidang Perkebunan selama 2011 sampai dengan 2015 cukup baik dengan capaian rata-rata mencapai 90 %. Ada beberapa kegiatan yang target capaiannya didalam rencana kinerja lima tahunan 2011-2016 tidak mencapai target yang di harapkan, antara lain peremajaan kelapa, peremajaan karet dan pengembangan kakao, hal ini terjadi karena beberapa kendala antara lain, pengurangan pendanaan akibat terjadinya devisa baik pendanaan dari APBD Kabupaten maupun APBN. Namun di komoditi yang lain seperti kelapa sawit dan pinang mengalami peningkatan yang cukup signifikan akibat harga komoditi tersebut bagus dan relatif stabil.

Capaian kinerja Bidang Perkebunan kabupaten Tanjung Jabung Barat dari sisi anggaran menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan capaian rata-rata realisasi anggaran mencapai 83 %, namun jika dilihat dari pertumbuhan anggaran dari 6 program unggulan hanya satu program yang mengalami pertumbuhan anggaran secara baik, sedangkan 5 program mengalami minus pertumbuhan. Progres capaian kinerja anggaran dapat dilihat dalam Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bidang Perkebunan
Tahun Anggaran 2011 - 2015 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Uraian	TARGET					Realisasi					Rasio antara realisasi dan Anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	Prog.Peningkatan Kesejahteraan Petani	70.818.002	72.068.000	191.773.900	209.929.600	135.399.900	70.818.001	66.051.000	169.030.150	181.374.200	107.122.225	100,0	91,7	88,1	86,4	79,1	-28,4%	-4,90%
2	program peningkatan ketahanan pangan	618.886.504	732.258.200	529.201.850	299.577.400	258.782.500	578.964.200	681.265.200	319.737.350	238.248.800	226.860.500	93,5	93,0	60,4	79,5	87,7	-16,1%	-3,20%
	(Pertanian/perkebunan)																	
3	peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	-	-	133.267.000	148.962.500	98.392.800	-	-	34.797.000	60.559.400	81.398.691	#DIV/0!	#DIV/0!	26,1	40,7	82,7	15,3%	17,30%
4	Prog. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	-	-	282.729.000	-	-	-	-	101.194.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	35,8	#DIV/0!	#DIV/0!	20,0%	
5	Prog.Pengembangan Agribisnis	-	111.814.000	77.331.000	-	128.816.000	-	108.174.500	72.646.000	-	119.628.000	#DIV/0!	96,7	93,9	#DIV/0!	92,9	-8,9%	-0,60%
6	Prog.Peningkatan Produksi Perkebunan	1.748.356.507	2.833.055.000	4.374.678.550	4.280.977.700	1.329.132.400	1.688.826.400	2.942.292.560	3.404.318.400	3.517.210.740	1.116.007.690	96,6	103,9	77,8	82,2	84,0	-4,30	-3,80%
		3.056.947.517	4.593.267.400	6.195.514.150	5.736.166.100	2.444.952.500	2.917.572.801	4.587.222.960	4.494.106.250	4.671.603.240	2.080.683.006	95	73	73	75	85		

Tabel 2.5
Realisasi Rencana Strategis
Bidang Perkebunan Tahun Anggaran 2011 - 2015
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Program Bid. Perkebunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatkan SDM Petani Perkebunan				85%	85%	85%	90%	95%										
	(1) Pelatihan Pemberdayaan Petani SKE	50 kelas	50 kelas	Jumlah petani	10 kls	10 kelas	10 kelas	10 kelas	10 kelas	10 kelas	10 kelas	10 kelas	10 kelas	10 kelas	20%	20%	20%	20%	20%
	(2) Lomba Kelompok Tani Perkebunan	45 klp	45 klp	Jumlah kelompok petani	-	45 Klp	45 Klp	45 Klp	45 Klp	-	-	-	45 klp	-	0%	0%	0%	20%	0%
	(3) Pembinaan kelembagaan dan Kemitraan Perkebunan	4 Asosiasi	4 Asosiasi	Jumlah Asosiasi yang dibina	-	4 aso	4 aso	4 aso	4 aso	-	4 Aso	4 Aso	-	5 Aso penilai & 19 pers	-	20%	20%	-	20%
Peningkatan ketahanan pangan perkebunan	Untuk mendukung peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan				80%	80%	80%	90%	95%										
	(1) pengendalian hama penyakit tanaman	600 Ha	600 Ha	Jumlah lahan perkebunan yg dilakukan pengendalian hama	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	20%	20%	20%	20%	20%
	(2) peningkatan perlindungan usaha perkebunan	600 Ha	600 Ha		100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	20%	20%	20%	20%	20%

Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

	(3) pemetaan lahan perkebunan	5 kom	5 kom		1 kom	1 kom	1 kom	1 kom	1 kom	1 kom	1 kom	-	-	-	20%	20%	0%	0%	0%
	(4) dana sinergis program sarana pertanian/perkebunan	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	620 Batang paralon	-	-	-	0%	0%	20%	0%	0%
Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan	Meningkatkan sarana prasarana pembangunan perkebunan																		
	(1) pengadaan sarana prasana pertania	85%		Jumlah bantuan sarana dan prasarana pertanian	-	0%	85%	90%	95%	-	-	10 unit pengupas kopi, 4500 m jaring babi, 20 unit lantai jemur, 425 batang paralon	1500 m jaring babi, 40 unit lantai jemur	-	0%	0%	20%	20%	0%
	(2) dana sinergis pengolahan hasil perkebunan				80%	80%	80%	90%	95%		6 unit alat pengolahan				20%	20%	20%	20%	20%
	(3) promosi pemasaran hasil perkebunan	85%		Tersedianya informasi harga komoditi perkebunan	-	-	100%	100%	100%			1 informasi harga 12 bulan	1 informasi harga 12 bulan	1 informasi harga 12 bulan	20%	20%	20%	20%	20%
Peningkatan penerapan teknologi perkebunan	Peningkatan penerapan IPTEK				85%	85%	85%	90%	95%										
	(1) pemeliharaan lanjutan kebun percontohan kelapa sawit	5 Ha	5 Ha		5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5 Ha	5%	5%	100%	100%	100%	100%	100%
	(2) integrasi ternak besar kelapa sawit	12 unit	12 unit		-	-	3 unit	3 unit	4 unit			3 unit	3 unit	-	0%	0%	20%	20%	0%

Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

	(3) magang/pelatihan petani karet, kopi, kelapa dan sawit	125 org	125 org		25 org	25 org	25 org	25 org	25 org	-	25 org	25 0rg	-	-	0%	0%	20%	20%	0%
Peningkatan produksi perkebunan	Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan, kelapa sawit, kelapa dalam, karet,kopi dan pinang				80%	80%	85%	85%	90%										
	(1) pembibitan kelapa sawit	70.000 kecambah	70.000 kecambah		15.000 kecambah	34.500 kecambah	30.000 kecambah	20.000 kecambah	25.000 kecambah	15.000 kecambah	34.500 kecambah	30.000 kecambah	20.000 kecambah	25.000 kecambah	21%	49%	43%	29%	29%
	(2) pemeliharaan lanjutan pembibitan kelapa sawit	1 Ha	1 Ha		1 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha	1 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha			20%	20%	20%	0%
	(3) pembibitan/pemeliharaan pembibitan karet	1 Ha	1 Ha				1 Ha	1 Ha	1 Ha						0%	0%	0%	0%	0%
	(4) pemeliharaan kebun entres karet	4 Ha	4 Ha		4 Ha	4 Ha	4 Ha	4 Ha	4 Ha	4 Ha	4 Ha	4 Ha	4 Ha	4 Ha	20%	20%	20%	20%	20%
	(5) pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT)	228 Ha	228 Ha		228 Ha	228 Ha	228 Ha	228 Ha	228 Ha	228 Ha	228 Ha	228 Ha	228 Ha	228 Ha	20%	20%	20%	20%	20%
	(6) penetapan/pemeliharaan BPT kopi exelse	50 Ha	50 Ha		50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	20%	20%	20%	20%	20%
	(7) pengembangan/pe remajaan kebun kelapa rakyat	2500 Ha	2500 Ha		500 Ha	500 Ha	500 Ha	500 Ha	500 Ha	500 Ha	500 Ha	600 Ha	500 Ha	200 Ha	20%	20%	20%	20%	20%
	(8) pengembangan/pe remajaan kebun karet rakyat	870 Ha	870 Ha		50 Ha	70 Ha	150 Ha	250 Ha	100 Ha	50 Ha	70 Ha	150 Ha	250 Ha	250 Ha	6%	8%	17%	29%	11%
	(9) pembangunan kebun kakao rakyat	160 Ha	160 Ha				20 Ha	50 Ha	40 Ha			20 Ha	50 Ha						

Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

	(10) pembinaan lintas sektoral	10 Desa	10 Desa		2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa					
	(11) intensifikasi kebun kopi rakyat	500 Ha	500 Ha				200 Ha	250 Ha	100 Ha			250 Ha	250 Ha						
	(12) pengembangan jaringan air dan lahan	1500 Ha	1500 Ha		500 Ha	600 Ha	425 Ha	500 Ha	500 Ha	500 Ha	600 Ha		425 Ha						
	(13) pengolahan data statistic perkebunan	20 Buku	20 Buku		20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku					

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang perkebunan dan peternakan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perkebunan dan Peternakan memberikan pelayanan umum bidang perkebunan dan peternakan. Adapun tabel untuk gambaran kinerja pelayanan Bidang Peternakan dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini :

Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

	c. Tersedianya laporan informasi pasar d. Terlaksananya Panen ternak hasil IB e. Terdatanya data jual beli ternak				1 kali 1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 kali 1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 100	- 100	- 100	- 100	- 100
						-	1 kali	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100	-	-
						-	-	1 dok	1 dok	-	-	-	1 dok	1 dok	-	-	-	100	100
4.	<u>Program Peningkatan kesehatan petani</u> a. Terlaksananya pertemuan kelompok petani SMD dan LM3	-			4 kali	4 kali	3 kali	0	0	4 kali	4 kali	3 kali	0	0	100	100	100	100	100
5.	<u>Program Peningkatan Teknologi Peternakan</u> a. Tersedianya Peralatan Teknologi Tepat Guna	-			4 unit	3 unit	9 unit	14 unit	5 unit	6 unit	11 unit	5 unit	12 unit	-	150	360,7	55,6	85,8	-

Tabel 2.4.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2015**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggraan Tahun Ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggara n	Realisa si
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>Program Peningkatan produksi Hasil peternakan</u> a.	1.720.095.950	1.663.784.150	2.782.584.100	3.338.198.500	1.507.375.520	1.680.244.950	1.397.100.450	1.768.903.750	2.398.623.256	1.445.354.138	97,7%	83,9%	63,6%	71,9%	95,9%		
<u>Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</u>	381.773.000	685.461.500	774.836.950	973.791.500	773.186.500	345.182.000	593.357.850	736.734.450	902.136.500	754.279.500	90,4%	86,6%	95,1%	92,7%	97,6%		
<u>Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan</u> a.	103.022.000	38.102.000	118.469.350	234.515.000	235.316.900	73.167.000	38.102.000	114.139.350	207.390.900	232.263.900	71,0%	100%	96,3%	88,5%	98,7%		
<u>Program peningkatan keselamatan netani</u>	32.537.000	35.525.000	38.132.200	-	-	32.152.000	32.425.000	38.132.200			98,8%	91,3%	100%				
<u>Program peningkatan teknologi peternakan</u>	161.926.050	257.449.050	184.390.250	334.788.000	69.288.100	158.123.500	248.912.000	101.315.250	281.942.000	69.000.100	97,7%	96,7%	54,9%	84,3%	99,58%		

Dari Tabel terlihat bahwa terjadi kenaikan populasi sapi dari 6.510 ekor ditahun 2011 menjadi 7.193 ekor di tahun 2015 dengan laju kenaikan 10,49 % selama 5 tahun.



Peningkatan angka kelahiran ternak sapi tidak diiringi dengan peningkatan populasi secara signifikan, hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah ternak yang dipotong dan banyaknya jumlah ternak yang dijual keluar daerah, selain itu untuk perhitungan populasi ternak tidak hanya dipengaruhi oleh angka kelahiran tetapi dipengaruhi juga dengan pematangan ternak, pengeluaran ternak, pemasukan ternak dan kematian ternak. Hal yang sama juga terjadi pada ternak kerbau, dimana terjadi kenaikan populasi ternak kerbau dari 444 ekor ditahun 2011 menjadi 607 ekor pada tahun 2015 dengan laju kenaikan 36,71 % selama 5 tahun. Terjadinya peningkatan populasi ini perlu dipertahankan dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Untuk ternak unggas ayam buras dan itik populasinya juga terus meningkat selama 5 tahun untuk pertumbuhan ayam buras 64%

sedangkan ternak itik terjadi pertumbuhan 42,64 %. Sementara untuk ayam broiler (ayam pedaging) dan ayam ras petelur memang tidak dipelihara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dikarenakan harga pakan yang cukup mahal sehingga kalau pemeliharannya dalam skala kecil, peternak tidak dapat keuntungan. Untuk memenuhi kebutuhan daging ayam broiler pedagang langsung membeli ayam yang siap potong sehingga untuk konsumsi daging ayam broiler di Tanjab Barat masih mencukupi, begitu juga untuk telur ayam ras masih mendatangkan telur dari luar daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Tugas dari Dinas Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan tupoksi adalah melaksanakan urusan urusan pemerintahan daerah dibidang Perkebunan dan Peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

1. Sebagai penyusun kebijakan dibidang perkebunan dan Peternakan.
2. Pelaksanaan dan pengendalian teknis.
3. Pembinaan dan perizinan sesuai bidangnya.
4. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Dari uraian diatas untuk penunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pelayanan ***Bidang Perkebunan*** memiliki beberapa ***tantangan*** sebagai berikut :

1. Masih rendahnya produktifitas komoditi perkebunan dibandingkan dengan produktifitas nasional.
2. Rendahnya mutu hasil olahan/industri perkebunan yang menyebabkan rendahnya harga tawar akan produk komoditi perkebunan.
3. Tingkat SDM pelaku usaha perkebunan dan agroindustri perkebunan yang masih rendah dan kurang terampil menjadikan produk perkebunan tidak memiliki daya saing di pasar domestic dan regional.
4. Minimnya sarana dan prasarana serta informasi pasar yang dapat diakses oleh masyarakat perkebunan.

5. Masih tingginya serangan organisme pengganggu tanaman dan gangguan usaha perkebunan.

Adapun *peluang* yang akan mendukung pengembangan pelayanan yang akan dilakukan di *Bidang Perkebunan* yaitu :

1. Daerah strategis berada dalam kawasan pertumbuhan ekonomi.
2. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah.
3. Tersedianya potensi lahan yang memadai.
4. Terbukanya lapangan kerja dibidang perkebunan.
5. Tumbuhnya investasi tanaman perkebunan dan industry.
6. Pendanaan APBD berorientasi pada kinerja.

Tantangan yang dihadapi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengimplementasi program pembangunan bidang Perkebunan dan peternakan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai satuan kerja pemerintah daerah sangat beragam. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat permasalahan yang ada di bidang Perkebunan dan peternakan cukup kompleks. Untuk itu Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus berbenah diri dalam sistem pelayanan kepada masyarakat. Adapun *tantangan* yang dihadapi Dinas Perkebunan dan Peternakan Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di *Bidang Peternakan* antara lain :

1. Meningkatnya permintaan akan produk ternak seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kesejahteraan dan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Kondisi Perekonomian Global Perkembangan regional dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
3. Perubahan Iklim, kerusakan lingkungan dan bencana alam sangat berpengaruh terhadap kesehatan ternak sehingga sangat berpengaruh terhadap produktivitas ternak.
4. Harga Daging Sapi yang setiap tahun terus naik.

Selain tantangan yang dihadapi terdapat juga *peluang* untuk perkembangan pembangunan di *Bidang Peternakan* antara lain :

1. Masih luas lahan untuk sektor peternakan.
2. Integrasi sapi sawit.
3. Pemasaran produk peternakan berdekatan dengan SIJORI.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2011-2016 dapat memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan oleh petani, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.



Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di *Bidang peternakan* Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain yaitu :

1. Minimnya Infrastruktur serta Sarana dan Prasarana.
2. Tata ruang bidang peternakan di daerah tidak diatur secara mendetail.
3. Peran kelembagaan dan SDM petani yang belum optimal.

4. Kurangnya tenaga medis dan paramedis.
5. Kurangnya modal petani, sehingga selalu tergantung dengan bantuan pemerintah.
6. Produksi dan produktifitas peternakan belum optimal.
7. Pakan yang belum memenuhi kualitas dan kuantitas.
8. Rendahnya Mutu produk hasil peternakan.
9. Masih tingginya serangan penyakit hewan menular.

Pembangunan Bidang Perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi beberapa tanaman perkebunan antara lain : *Karet, Kelapa Sawit, Kelapa dalam, Kopi, Pinang, Lada dan Coklat.*



Dalam pengembangannya sektor perkebunan memiliki permasalahan yang harus diatasi untuk dapat memberikan daya guna yang lebih optimal bagi potensi ekonomi daerah. Pemasalahan yang timbul dan menjadi kendala dalam membangun sektor perkebunan antara lain :

1. Masih rendahnya produktifitas komoditi perkebunan.
2. Rendahnya mutu hasil/olahan yang menyebabkan rendahnya harga tawar menawar akan produk komoditi perkebunan
3. Tingkat sumber daya manusia sebagai pelaku usaha perkebunan dan agroindustri perkebunan yang masih rendah.
4. Ketersediaan teknologi tepat guna yang terbatas dan kurangnya pemanfaatan penggunaan teknologi industri untuk hasil olahan perkebunan.
5. Minimnya sarana dan prasarana serta informasi pasar yang dapat diakses oleh masyarakat perkebunan.
6. Masih tingginya serangan organisme penyakit tanaman dan gangguan usaha perkebunan.

Untuk lebih terperinci dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas
Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Bidang Peternakan.</u>					
Persentase pertumbuhan dan populasi ternak.	Populasi ternak : - Sapi - Kerbau - kambing - Domba - Unggas	Laju pertumbuhan populasi ternak sebesar 2 % per tahun	a. SDM petugas peternak b. Masih tingginya kematian ternak c. Minimnya sarana dan prasarana d. Kurangnya ketersediaan obat hewan	a. Banyaknya pemotongan betina produktif b. Sulitnya mencari bibit ternak yang berkualitas c. Pencurian ternak masih banyak d. Rendahnya Mutu produk hasil perkebunan dan peternakan	a. Kurangnya tenaga medis dan paramedis b. Kelembagaan dan SDM Peternak c. Regulasi /Tata Ruang bidang peternakan d. Minimnya Infrastruktur dan sarana pelayanan teknis e. Kurangnya akses Peternak untuk mendapatkan modal.
<u>Bidang Perkebunan.</u>					
Produksi Hasil Perkebunan	Produksi Perkebunan : - Kelapa Sawit - Kelapa Dalam - Kopi - Pinang - Karet	Persentase pertumbuhan Produksi Perkebunan	a. SDM Petugas Perkebunan b. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan	a. Pengetahuan petani yg masih rendah dalam penggunaan Teknologi Tepat Guna. b. Kurangnya penggunaan IPTEK.	a. Masih kurangnya anggaran yg langsung bersentuhan dengan petani b. Pendidikan dan pelatihan yg berkesinambungan bagi tenaga teknis perkebunan
Mutu Produk hasil perkebunan			Ketersediaan teknologi tepat guna yang terbatas dan kurangnya	a. Masih tingginya serangan organisme penyakit	Pengetahuan SDM perkebunan dalam

			<p>pemanfaatan penggunaan teknologi industri untuk hasil olahan perkebunan</p>	<p>tanaman dan gangguan usaha perkebunan.</p> <p>b. Minimnya sarana dan prasarana serta informasi pasar yang dapat diakses oleh masyarakat perkebunan</p> <p>c. Tingkat sumber daya manusia sebagai pelaku usaha perkebunan dan agroindustri perkebunan yang masih rendah</p>	<p>penguasaan Teknologi untuk peningkatan mutu hasil perkebunan</p>
--	--	--	--	---	---

3.2. Telaah Visi dan Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2016 -2021.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu dan diselaraskan dengan *Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021*.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2016-2021 telah menetapkan Visi Pembangunan yaitu :

Visi :
***Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas***

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan **4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021** sebagai berikut :

KODE	MISI
MISI 1	Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas
MISI 2	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup
MISI 3	Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan
MISI 4	Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik

Dari misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 yang terkait dan menjadi tugas dari Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah pada **Misi Ketiga, yaitu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat melalui Agroindustri dan Perikanan.**

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi, Misi tersebut adalah dengan Program dan Kegiatan prioritas pembangunan Bidang Perkebunan dan Peternakan, agar supaya sector Perkebunan dan Peternakan bisa memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat, sehingga diharapkan sector Perkebunan dan Peternakan bisa menjadi program/kegiatan unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : “ Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat melalui Agro Industri dan Perikanan 1. Program Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung kedaulatan pangan (peningkatan kapasitas penyuluh, bantuan alat mesin pertanian dan sarana sarana produksi) 2. Program Peningkatan nilai tukar petani (peningkatan kualitas produksi, fasilitas akses pasar, peningkatan pembangunan jalan produksi, peningkatan keterampilan petani dan pengetahuan petani. 3. Peningkatan investasi industri pengolahan	Bidang	PETERNAKAN	
		1. SDM petugas dan peternak 2. Masih tingginya kematian ternak 3. Minimnya sarana dan prasarana 4. Kurangnya ketersediaan obat hewan	1. Tingginya pemotongan betina produktif 2. Sulitnya mencari bibit ternak yang berstandar SNI 3. Minimnya ketersediaan indukan 4. Rendahnya alokasi anggaran untuk sektor peternakan 5. Ketersediaan pakan yang berkualitas masih rendah 6. Penerapan teknologi pengolahan pakan belum optimal 7. Kurangnya akses Peternak untuk mendapatkan modal	1. Kapasitas tampung wilayah untuk ternak masih tinggi 2. Tingkat konsumsi daging setiap tahun cenderung naik 3. Letak Kab. Tanjab Barat berdekatan dengan SIJORI (untuk akses pasar) 4. Kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa 5. Sumber daya pakan melimpah 6. Integrasi tanaman dan ternak
		Bidang	PERKEBUNAN	

	<p>dan pemberdayaan petani dalam penguasaan teknologi tepat guna</p> <p>4. Program Peningkatan pelayanan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan (misi 2)</p>	<p>a. SDM Petugas Teknis Perkebunan</p> <p>b. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan</p> <p>a. Ketersediaan teknologi tepat guna yang terbatas dan kurangnya pemanfaatan penggunaan teknologi industri untuk hasil olahan perkebunan</p>	<p>a. Masih kurangnya anggaran yg langsung bersentuhan dengan petani</p> <p>b. Kurangnya Pendidikan dan pelatihan yg berkesinambungan bagi tenaga teknis perkebunan</p> <p>c. Pengetahuan SDM perkebunan dalam penguasaan Teknologi untuk peningkatan mutu hasil perkebunan</p> <p>c. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan</p>	<p>a. Kondisi Geografis yg sangat memungkinkan untuk Perkebunan terutama Kelapa Dalam, Kelapa Sawit, Kopi, Pinang, Karet serta pengembangan jenis baru perkebunan seperti kakao</p> <p>b. Keterbukaan akses transportasi darat yg semakin meningkat untuk arus lalu lintas perkebunan.</p> <p>c. Posisi Kab. Tanjung Jabung Barat yg strategis penghubung Provinsi Jambi dengan Selat Malaka dan SIJORI terutama setelah dibuka Akses melalui Pelabuhan Roro.</p> <p>d. Pertumbuhan Ekonomi Tanjung Jabung Barat yg masih disokong oleh hasil perkebunan rakyat.</p>
--	--	--	--	--

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** dengan memperhatikan Visi Pembangunan Nasional tersebut, dengan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam Pembangunan Pertanian maka Kementerian Pertanian RI menetapkan Visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA SISTEM PERTANIAN BIOINDUSTRI BERKELANJUTAN YANG MENGHASILKAN BERAGAM PANGAN SEHAT DAN PRODUK BERNILAI TAMBAH TINGGI BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL UNTUK KEDAULATAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI”.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Pertanian RI menetapkan *Misi* sebagai berikut :

KODE	MISI
MISI 1	Mewujudkan kedaulatan pangan
MISI 2	Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan
MISI 3	Mewujudkan kesejahteraan petani
MISI 4	Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian maka ditetapkan *Tujuan Pembangunan Pertanian periode 2015 -2019* yang ingin dicapai yaitu :

Tujuan	
T1	Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan
T2	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian
T3	Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
T4	Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani
T5	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional

Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Pertanian tersebut maka ditetapkan Sasaran yg merupakan **Indikator Kinerja (IKSS)** Kementerian Pertanian yang ingin dicapai dalam Periode 2015 - 2019 adalah :

1. Swasembada Padi, Jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula.
2. Peningkatan Diversifikasi pangan.
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.

4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
5. Peningkatkan pendapatan keluarga petani
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Arah kebijakan akan dimplitasikan kedalam Program dan Kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2015 - 2019 Sektor Perkebunan dan Peternakan sebagai berikut :

Program	Kegiatan
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman Perkebunan Berkelanjutan.	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar
	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim
	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan
	Dukungan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha
	Dukungan Perlindungan Perkebunan
	Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Tekhnis Lainnya Ditjen Perkebunan
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal
	Peningkatan Produksi pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosi
	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber daya Lokal
	Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Tekhnis Lainnya Ditjen peternakan
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan	Pengembangan Pengolahan hasil pertanian Bioindustri
	Pengembangan Mutu dan Standarisasi Hasil pertanian

Investasi Pertanian	Pengembangan Usaha dan Investasi
	Pengembangan Pemasaran Internasional
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Tekhnis lainnya pada Ditjen PPHP
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Perluasan areal dan Pengelolaan lahan Pertanian
	Pengelolaan Air Irigasi Untuk pertanian
	Penyaluran Pupuk Bersubsidi
	Pengelolaan Sistem penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian
	Pelayanan Pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
Dukungan manajemen dan dukungan tekhnis lainnya pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	

Sumber : Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019

Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian pada Sektor Perkebunan dan Peternakan Tahun 2015-2019 adalah:

Tabel 3.3.
Indikator Kinerja Kementerian Pertanian

No.	Rincian IKU	Baseline 2014	Target					Perubahan (%)
			2015	2016	2017	2018	2019	
1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula								
	Produksi Padi (juta ton)	70,8	73,4	76,2	78,1	80,1	82,1	3,0
	Produksi Jagung (juta ton)	19,0	20,3	21,4	22,4	23,5	24,7	5,4
	Produksi Kedelai (juta ton)	0,25	1,20	1,82	2,76	3,95	3,00	27,5
	Produksi Gula Tebu (hablur juta ton)	2,83	2,97	3,27	3,50	3,80	3,82	7,8
	Produksi Daging Sapi dan kerbau (ribu ton karas dan ribu ton daging)	460,4	545,3	588,5	639,6	695,0	755,1	10,5
		368,4	436,2	470,9	511,7	556,0	604,0	10,5
2. Peningkatan diversifikasi pangan								
	Skor Pola Pangan Harapan	81,4	84,1	86,2	88,4	90,5	92,5	1,5
	Konsumsi Kalori (Kkal)	1.987	2.004	2.040	2.077	2.113	2.150	1,8
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya sang dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor								
	Pertumbuhan volume ekspor produk pertanian utama (%)	8	10	10	10	10	10	10,0
	Pertumbuhan volume impor produk pertanian utama substitusi impor (%)	7	-5	-5	-1	1	1	-1,0
	Produksi Cabe besar (ribu ton)	1.041	1.082	1.106	1.140	1.174	1.209	3,0
	Produksi Cabe rawit (ribu ton)	735	751	759	770	782	794	1,6
	Produksi Bawang merah (ribu ton)	1.061	1.125	1.173	1.231	1.284	1.360	5,1
	Produksi Mangga (ribu ton)	2.258	2.185	2.340	2.399	2.460	2.519	2,4
	Produksi Nenas (ribu ton)	1.851	1.888	1.925	1.964	2.003	2.042	2,0
	Produksi Manggis (ribu ton)	142	144	147	150	152	155	1,8
	Produksi Satek (ribu ton)	1.038	1.059	1.080	1.102	1.124	1.146	2,0
	Produksi Kemiri (ribu ton)	1.286	1.322	1.348	1.375	1.403	1.431	2,0
	Produksi Jeruk Siam (ribu ton)	1.587	1.640	1.693	1.766	1.845	1.913	3,8
	Produksi Karet (Karet kering ribu ton)	3.153	3.320	3.438	3.559	3.683	3.810	3,9
	Produksi Kopi (kopi bewang ribu ton)	685	723	739	751	765	779	3,6
	Produksi Kakao (biji kering ribu ton)	789	773	831	872	910	961	6,2
	Produksi Lada (lada kering ribu ton)	82	83	84	85	86	87	1,1
	Produksi Pala (biji kering ribu ton)	28	28	29	30	32	33	3,1
	Produksi Cendek (bunga kering ribu ton)	111	112	113	117	119	121	1,9
	Produksi Kelapa (sawar kopra ribu ton)	3.031	3.309	3.355	3.481	3.446	3.491	2,9
	Produksi Teh (daun kering ribu ton)	144	160	160	161	162	163	2,6
4. Penyediaan bahan baku industri dan bioenergi								
	Produksi Kelapa Sawit (CPO ribu ton)	29.344	30.798	30.845	32.657	34.515	36.420	4,4
	Produksi Ubi kayu (ribu ton)	26,4	26,5	27,1	27,8	28,2	28,8	1,7
5. Peningkatan pendapatan ket. anga petani								
	POB pertanian sempit/TK pertanian (Rp. Juta)	8,0	8,3	8,6	9,0	9,4	9,8	4,3
	Tingkat Kemiskinan di pedesaan (juta orang)	17,1	16,6	16,0	15,5	14,9	14,4	-3,4
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik								
	Nilai reformasi birokrasi kementerian	63	72	73	74	75	76	
	Opini laporan keuangan kementerian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Sumber : Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019

3.4 Telaahan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Visi Dinas Perkebunan Propinsi Jambi adalah “**Terwujudnya perkebunan yang tangguh berbasis kerakyatan, berwawasan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan**”.

A. MISI.

Misi Dinas Perkebunan Propinsi Jambi 2016 -2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan yang berorientasi pada agribisnis melalui pengembangan komoditi unggulan dan potensial.
2. Meningkatkan penggunaan benih unggul komoditi perkebunan, serta pengawasan peredaran benih dan sarana Input .
3. Meningkatkan kemandirian dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman Perkebunan.
4. Meningkatkan kualitas SDM pekebun melalui pelatihan teknis dan pemberdayaan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE)
5. Meningkatkan Penerapan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran hasil perkebunan.
6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur di areal perkebunan rakyat .
7. Meningkatkan koordinasi dalam mengendalikan Gangguang Usaha Perkebunan (GUP) serta kebakaran lahan dan kebun.
8. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif untuk menarik minat investor dalam pengembangan perkebunan

9. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha perkebunan

B. TUJUAN.

Dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan pembangunan perkebunan Propinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal.
2. Meningkatkan dan menetapkan swasembada berkelanjutan.
3. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

C. SASARAN.

Adapun sasaran yang hendak dicapai melalui visi, misi dan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan.
2. Investasi usaha perkebunan.
3. Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.
4. Peningkatan dukungan terhadap pembangunan sistem ketahanan pangan.
5. Pengembangan komoditi.

3.5 Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi.

Arah kebijakan dan strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi tahun 2016-2021 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi. Untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang peternakan tahun 2016 -2021 maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jambi merumuskan Visi “ *Terwujudnya Kemandirian dan Keamanan Pangan Asal Ternak* “ untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jambi sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketersediaan Pangan asal ternak
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak serta produk ternak
3. Meningkatkan manajemen pelayanan peternakan dan kesehatan hewan
4. Mengembangkan kebun binatang menjadi sarana pelestarian , edukasi dan rekreasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jambi maka tujuan pembangunan peternakan 2016 -2021 yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan populasi , produksi dan produktivitas ternak
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing agribisnis peternakan
3. Mengembangkan sistem informasi untuk mendukung ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.
5. Meningkatkan koordinasi, fasilitas dan pembinaan lingkungan peternakan
6. Meningkatkan tata kerja peternakan dan kesehatan hewan
7. Meningkatkan konservasi satwa, edukasi dan litbang serta rekreasi

Sasaran merupakan indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jamb dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2016 - 2021 adalah ::

1. Meningkatkan populasi , produksi dan produktivitas ternak
2. Meningkatkan nilai tambah produk peternakan dan ketersediaan pangan asal hewan yang Aman, sehat, Utuh dan Halah (ASUH) serta berdaya saing
3. Tersedianya data yang berkualitas untuk mendukung evaluasi dan perumusan kebijakan.
4. Terlaksananya sinergitas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.
5. Terciptanya sistem kerja yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
6. Tersedianya sarana dan prasarana konservasi satwa, edukasi dan litbang serta rekreasi.

Arah kebijakan akan dimplitakan kedalam program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi tahun 2016- 2021 untuk menuju Jambi Tuntas sebagai berikut :

1. Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak
- 2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Zoonosis
- 3) Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Lalu lintas Hewan

2. Program Peningkatan Produksi Peternakan

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pembangunan sarana dan prasarana perbibitan Ternak
2. Pengembangan Balai Perbibitan Ternak.
3. Pembangunan Sentra Peternakan Rakyat (SPR).
- 4 . Pengembangan Integrasi Peternakan.
- 5 . Pengembangan Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia.
- 6 . Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan.

3. Program Pengembangan Usaha Peternakan

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
- 2) Penguatan Kelembagaan Peternakan
- 3) Permodalan dan Investasi

4. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Peningkatan Produk Peternakan Yang ASUH
- 2) Pembinaan Unit Usaha Pangan Asal Hewan
- 3) Penerapan Kesrawan dan Perlindungan Masyarakat

5. Program Peningkatan Fungsi Laboratorium Keswan dan Kesmavet

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Peningkatan Kapasitas Laboratorium Keswan dan Kesmavet
- 2) Monitoting, Surveilans dan pemeriksaan

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Peternakan
- 2) Monitoring dan Evaluasi
- 3) Statistik Peternakan
- 4) Penata Usahaan Pelaporan Keuangan

7. Program Peningkatan Pelestarian Satwa, Edukasi dan Rekreasi Masyarakat

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Pengembangan Kebun Binatang
- 2) Pemeliharaan dan Perawatan Satwa

Berdasarkan telaahan pada subbab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan permasalahan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L diterangkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan produksi Daging ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya tenaga medis dan paramedis 2. Kelembagaan dan SDM Peternak 3. Minimnya Infrastruktur dan sarana pelayanan teknis 4. Kurangnya Modal Peternak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beternak masih secara tradisional (usaha sambilan) 2. Sulitnya mencari bibit ternak yang berkualitas 3. Minimnya ketersediaan indukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas tampung untuk ternak masih tinggi 2. Tingkat konsumsi daging setiap tahun cenderung naik 3. Letak Kab. Tanjab Barat berdekatan dengan SIJORI (untuk akses pasar)
2	Peningkatan Produksi Perkebunan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kopi. 2. Karet 3. Kelapa Dalam 4. Kelapa Sawit (CPO) 	<ol style="list-style-type: none"> a. SDM Petugas Teknis Perkebunan b. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan d. Ketersediaan teknologi tepat guna yang terbatas dan kurangnya pemanfaatan penggunaan teknologi industri untuk hasil olahan perkebunan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Masih kurangnya anggaran yg langsung bersentuhan dengan petani b. Kurangnya Pendidikan dan pelatihan yg berkesinambungan bagi tenaga teknis perkebunan c. Pengetahuan SDM perkebunan dalam penguasaan Teknologi untuk peningkatan mutu hasil perkebunan d. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kondisi Geografis yg sangat memungkinkan untuk Perkebunan terutama Kelapa Dalam, Kelapa Sawit, Kopi, Pinang, Karet serta pengembangan jenis baru perkebunan seperti kakao. b. Keterbukaan akses transportasi darat yg semakin meningkat untuk arus lalu lintas perkebunan. c. Posisi Kab. Tanjung Jabung Barat yg strategis penghubung Provinsi Jambi dengan Selat Malaka dan SIJORI terutama setelah dibuka Akses melalui Pelabuhan Roro. d. Pertumbuhan Ekonomi Tanjung Jabung Barat yg masih disokong oleh hasil perkebunan rakyat.

3.6 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang Perkebunan Peternakan. Sehingga secara khusus ada keterkaitan langsung dengan **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)** di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Strategi pengembangan dan pemanfaatan potensi Peternakan secara optimal Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (**RTRW**) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Paragraf (2) Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 36 yang berisikan :

- (2) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf b meliputi:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan
 - b. kawasan hortikultura
 - c. kawasan perkebunan dan
 - d. kawasan peternakan
- (3) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Pengembangan sentra peternakan sapi berada tersebar di Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Tebing Tinggi;
 - b. Pengembangan sentra peternakan komoditas unggas berada tersebar di Kecamatan Bram Itam dan

- c. Kawasan pengembangan ternak terintegrasi dengan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
- (4) Bagian ketiga Perwujudan Rencana Pola Ruang pasal 68.
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - (a) Penetapan kawasan sentra peternakan dan penetapan komoditas unggulan;
 - (b) Pengembangan sentra bibit unggul
 - (c) Pengembangan sentra pengolahan pakan ternak
 - (d) Pengembangan pengolahan hasil peternakan
 - (e) Pengembangan pengolahan kotoran ternak
 - (f) Peningkatan produktifitas peternakan dengan komoditas sapi, kerbau, kambing, domba, ayam ras petelur dan ayam ras pedaging dan
 - (g) Peningkatan sarana dan prasarana peternakan
- (6) Bagian Kedua ketentuan Umum Peraturan Zonasi pasal 110 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dalam pasal 95 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. Kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan dan
 - d. Kawasan peruntukan peternakan
- (7) Pasal 114 berisikan :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 huruf d memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk

usaha peternakan yang menyatu dengan pemukiman masyarakat.

- b. Ketentuan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang (RTRW) Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<u>BIDANG PETERNAKAN</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Tata ruang untuk kawasan peternakan sapi di Kecamatan Batang Asam, Bram Itam, Ma. Papalik, Merlung dan Tebing Tinggi • Rencana Tata Ruang untuk ternak unggas Kecamatan Bram Itam • Kawasan Integrasi ternak dan perkebunan 	Usaha Peternakan menggunakan lahan kosong dipemukiman atau lahan yang ditanami dengan tanaman pangan maupun perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada regulasi tata ruang untuk peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Letak Kab. Tanjab Barat berdekatan dengan SIJORI (untuk akses pasar)
<u>BIDANG PERKEBUNAN</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Tata Ruang Integrasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Peternakan di Kec.Tungkal Ulu, Merlung, Ma.Papalik, Tebing Tinggi, Batang Asam • Road Map Pengembangan Perkebunan Tanjung Jabung Barat 	Penyediaan Bibit dan Teknologi Tepat Guna serta Tenaga Ahli dalam Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Anggaran APBD yg Defisit • Kerjasama yg kurang dalam Bentuk Dana CSR dengan Perusahaan yg terdapat pada wilayah kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Geografis yg memadai dalam pengembangan jenis perkebunan lainnya • Kondisi Geografis yang strategis penghubung Provinsi Jambi dengan Selat Malaka dan SIJORI yang merupakan Lalu Lintas Perdagangan Internasional. • Terbuka peluang Kerjasama dengan Pemerintah Pusat melalui dana APBN

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Analisis KHLS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Hasil KHLS Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<u>BIDANG PETERNAKAN</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Digestasi kotoran hewan untuk menghasilkan CH4 sebagai biogas • Peningkatan penggunaan kotoran hewan untuk pupuk 	a. Kurangnya SDM peternak dalam penggunaan TTG	Kurangnya penyaluran modal peternak	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas tampung untuk ternak masih tinggi • Tingkat konsumsi daging setiap tahun cenderung naik • Letak Kab. Tanjab Barat berdekatan dengan SIJORI (untuk akses pasar)
<u>BIDANG PERKEBUNAN</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> • Peluang Pengembangan Desa/Kawasan Sentra Agrobisnis yg mengabungkan Perkebunan dan Peternakan • Penentuan Kawasan Perkebunan Induk 	Kurangnya ketersediaan SDM, sarana dan prasarana pendukung	Pengetahuan Petani dalam memahami pengembangan sector Agrobisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Kawasan Perkebunan yang cukup baik dalam pembentukan kawasan Agroindustri dan Kawasan Perkebunan Induk

3.7 Penentuan Isu-isu Strategis.

Pembangunan Perkebunan dan Peternakan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan salah satu 9 (sembilan) Program Prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla atau yang sering disebut dengan Nawacita yaitu mewujudkan **Kemandirian Ekonomi** dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dimana sektor **Perkebunan dan Peternakan** merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan secara prinsipil direncanakan serta disusun sebagai satu kesatuan Perencanaan Pembangunan Nasional, dilakukan secara bersama oleh pemangku kepentingan, diintegrasikan dengan tata ruang wilayah dengan memperhatikan potensi dan prioritas daerah serta dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Sesuai dengan Nawacita Visi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan memilih *kedaulatan pangan asal ternak* pemilihan kedaulatan pangan telah pula mempertimbangkan keselarasan dengan visi kementerian pertanian dan telah sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jederal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan bidang peternakan diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya integrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan Perkebunan dan Peternakan terutama untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan dan peternakan. Dalam

menjalankan tugas pokok fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menghadapi Permasalahan antara lain :

1. Minimnya Infrastruktur serta Sarana dan Prasarana
2. Tata ruang bidang perkebunan dan peternakan di daerah tidak diatur secara mendetail
3. Belum adanya regulasi (Perda) di bidang perkebunan dan peternakan
4. Peran kelembagaan dan SDM petani yang belum optimal
5. Kurangnya tenaga medis dan paramedis
6. Kurangnya modal petani, sehingga selalu tergantung dengan bantuan pemerintah
7. Produksi dan produktifitas komoditi perkebunan dan peternakan belum optimal
8. Pakan yang belum memenuhi kualitas dan kuantitas
9. Rendahnya Mutu produk hasil perkebunan dan peternakan
10. Masih tingginya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penyakit hewan menular serta gangguan usaha perkebunan.

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengidentifikasi *Isu-Isu Strategis* antara lain :

1. Masih tingginya pemotongan betina produktif dan minimnya ketersediaan indukan dan bibit yang berkualitas.
2. Masih rendahnya produksi dan produktifitas komoditi perkebunan dan peternakan.

3. Masih kurangnya SDM petani kebun dan peternak.
4. Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing agribisnis perkebunan dan peternakan
5. Masih kurangnya anggaran untuk sektor perkebunan dan peternakan
6. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani kebun dan peternak.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat ditetapkanlah **Tujuan Strategis (TS), Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat** sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-n					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan serta Peningkatan Pengelolaan Lahan Produktif Perkebunan (T.1)	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan (SS.1) - Sawit - Karet - Kelapa - Kopi - Produksi Pinang	Bertambahnya Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) :						
			- Produksi Sawit	131,068	136,535	139,267	142,051	144,893	147,790
			- Produksi Karet	6,575	4,144	4,913	4,915	4,918	4,921
			- Produksi Kelapa	50,837	56,941	58,080	59,241	60,428	61,635
			- Produksi Kopi	1,323	1,263	1,288	1,314	1,340	1,367
		- Produksi Pinang	9,426	11,432	11,662	11,895	12,133	12,375	
		Meningkatnya Pengelolaan Lahan Produktif (SS.2) - Sawit - Karet - Kelapa - Kopi - Produksi Pinang	Bertambahnya Luas Lahan Perkebunan (Ha) :						
			- Luas Lahan Sawit	63,554	63,833	64,790	65,762	66,749	67,750
			- Luas Lahan Karet	14,035	9,821	9,826	9,831	9,836	9,841
			- Luas Lahan Kelapa	54,537	55,183	55,468	55,736	56,014	56,294
			- Luas Lahan Kopi	2,873	3,119	3,166	3,213	3,262	3,310
- Luas Lahan Pinang	10,524		10,484	10,798	11,122	11,456	11,800		

Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-n						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
2	Meningkatkan Produksi Daging Ternak dan Populasi Ternak (T.2)	Meningkatnya Produksi Daging (SS.3) - Sapi - Kerbau - Kambing - Domba - Unggas	Bertambahnya Produksi Daging Ternak (Kg) :							
			- Produksi Daging Sapi	310,310	285,658	291,371	297,199	303,143	309,205	
			- Produksi Daging Kerbau	9,218	12,844	13,101	13,363	13,630	13,903	
			- Produksi Daging Kambing	22,748	27,256	27,801	28,357	28,924	29,503	
			- Produksi Daging Domba	628	562	573	584	596	608	
			- Produksi Daging Unggas	3,251,718	2,331,966	2,378,600	2,426,179	2,475,444	2,524,952	
		Meningkatnya Populasi Ternak (SS.4) - Sapi - Kerbau - Kambing - Domba - Unggas	Bertambahnya Populasi Ternak (Ekor) :							
			- Populasi Sapi	8,616	8,389	8,557	8,728	8,902	9,801	
			- Populasi Kerbau	675	717	740	771	780	811	
			- Populasi Kambing	71,586	48,002	48,550	48,910	49,228	49,378	
			- Populasi Domba	750	790	816	845	865	890	
			- Populasi Unggas	1,819,070	1,099,095	1,054,050	1,211,753	1,272,340	2,335,957	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan **Strategi** merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian Kebijakan. **Kebijakan** adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan Strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Berikut Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

i. Strategi

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan melalui *Intensifikasi, Extensifikasi* dan *Diversifikasi*.
2. Peningkatan Populasi, Produksi dan Produktivitas ternak melalui *Gerakan Serentak Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB)*, Pemetaan kawasan peternakan, integrasi ternak dengan tanaman, pemanfaatan bahan pakan lokal dan pemberdayaan peternak, serta memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.
3. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani.
4. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan gangguan reproduksi dengan melaksanakan pengobatan, dan vaksinasi ternak serta mempertahankan dan memperluas status wilayah bebas penyakit hewan menular strategis.
5. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan melalui *UPPO, Rumah Kompos, Biogas* dan lain lain.

6. Pengembangan *Sentra Agribisnis* di kawasan Sentra Perkebunan dan Peternakan.
7. Meningkatkan infrastruktur serta sarana dan prasarana perkebunan dan peternakan.

ii. **K e b i j a k a n.**

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. *Kebijakan Umum* Kepala Dinas yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penyediaan bibit yang bermutu, pengendalian OPT, serta pengawasan peredaran Bibit, pupuk dan Pestisida.
2. Mewujudkan Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana keswan, obat-obatan, medis dan paramedis.

4. Peningkatan Pengelolaan sumberdaya Peternakan yang optimal dan berkelanjutan.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan**, dapat dilihat pada **Tabel 5.1** berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021

VISI : “ TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, ADIL, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS ”			
MISI 3: “ Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan ”.			
Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan serta Peningkatan Pengelolaan Lahan Produktif Perkebunan (T.1)	Meningkatnya produksi Komoditi Perkebunan (SS.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan hasil produksi dan Produktifitas Hasil Perkebunan. 2. Meminimalisir serangan Hama Penyakit Tanaman. 3. Meningkatkan kapasitas SDM Penyuluh dan Pelaku Usaha Perkebunan 4. Meningkatkan pengelolaan lahan produktif dengan pengembangan tanaman penyegar tahunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan peningkatan hasil produksi melalui Intensifikasi, Diversifikasi, Ekstensifikasi dengan penyediaan bibit yg bermutu. 2. Pengendalian OPT serta pengawasan peredaran Pupuk, Bibit dan Pestisida. 3. Penyebaran dan pemamfaatan tenaga penyuluh dalam pembinaan Kelompok Tani 4. Penyediaan bantuan bibit dan sarana produksi lainnya yg merupakan penunjang pengolahan perkebunan
	Meningkatnya pengelolaan Lahan Produktif (SS.2)		
Meningkatkan Produksi Daging Ternak dan Populasi Ternak (T.2)	Meningkatnya produksi Daging (SS.3)	Peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak melalui Gerakan Serentak Birahi (Gertak Birahi) melalui Kawin Suntik (IB), pemetaan perwilayahan, Integrasi Ternak dengan Sawit, Pemanfaatan Bahan pakan Lokal dan pemberdayaan peternak serta memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.	Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan guna mendukung peningkatan populasi dan produksi peternakan.
	Meningkatnya Populasi Ternak (SS.4)		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penetapan **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan** pada Dinas Perkebunan telah menyesuaikan dengan *Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2016- 2021* sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian *Tujuan dan Sasaran RPJMD*, dapat dilihat pada Tabel 6.1. dibawah ini, yaitu :

LAMPIRAN III
TABEL T.VIII C-1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Kondisi Capaian Awal RPJMD	Sesuan	Alokasi Anggaran (Rp.)												Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA SKPD		Pelaksana Eselon III
					Target 2016	Target 2016 (Rp.)	Target 2017	Target 2017 (Rp.)	Target 2018	Target 2018 (Rp.)	Target 2019	Target 2019 (Rp.)	Target 2020	Target 2020 (Rp.)	Target 2021	Target 2021 (Rp.)	Target Kinerja	Target (Rp.)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Integritas dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran	100	%	100	837.320.238	100	634.136.000	100	1.253.593.067	100	1.313.493.730	100	1.448.909.276	100	1.514.763.393	100	6.802.244.583	Sekretariat
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi	95	%	95	257.604.280	95	546.500.000	95	284.200.000	95	320.676.000	95	316.876.280	95	297.307.568	95	2.000.164.128	Sekretariat sarana prasarana
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	100	%	100	34.917.500	100	20.875.000	100	31.125.000	100	34.237.500	100	37.661.250	100	41.427.375	100	208.243.625	Sekretariat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan PNS	80	%	76	25.000.000	80	25.000.000	85	15.000.000	90	15.000.000	95	15.000.000	100	15.000.000	87	110.000.000	Sekretariat

Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

Kode	Program/Kegiatan	Bantuan Program (Dokumen)	Kondisi Capaian Awal RPJMD	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)												Kondisi Kinerja pada akhir periode		Pelaksana Eselon II
					Target 2016	Target 2016 (Rp.)	Target 2017	Target 2017 (Rp.)	Target 2018	Target 2018 (Rp.)	Target 2019	Target 2019 (Rp.)	Target 2020	Target 2020 (Rp.)	Target 2021	Target 2021 (Rp.)	Target	Target (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	terpentingnya promosi produk unggulan perkebunan	4	kali	4	95.281.500	2	110.040.000	2	60.070.000	2	75.007.000	2	83.453.700	2	91.790.070	15	530.411.270	Bid Perkebunan/ Bid Penyuluh
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dan Peternakan	kelompok tani yg menerapkan teknologi perkebunan dan peternakan	21	KT	6	272.201.000	10	350.000.000	10	290.580.000	10	1.794.700.000	10	1.896.020.000	10	2.003.627.500	56	6.613.108.500	Bid Sarana pasarana
	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Meningkatnya produksi (ton) dan Luas Lahan (Ha) 5 komoditi unggulan: kopi, karet, swit, pinang, kelapa dalam		Ton,Ha		1.330.282.100	-	1.803.595.500	-	2.290.631.250	-	2.624.535.353	-	2.722.447.859	-	1.086.237.500	-	12.400.030.041	Bidang Perkebunan
		- Produk Kelapa Sawit	131.234	ton	131.068		136.530		130.267		142.051		144.893		147.700		147.700		
		- Produk Karet	54.808	ton	6.575		4.144		4.913		4.915		4.916		4.921		4.921		
		- Produk Kelapa Dalam	54.908	ton	50.837		50.041		50.080		50.241		60.420		61.035		61.035		
		- Produk Kopi	1.214	ton	1.323		1.288		1.314		1.343		1.343		1.367		1.367		
		- Produk Pinang	9.882	ton	9.420		11.432		11.682		11.695		12.133		12.375		12.375		
		- Luas Lahan Kelapa Sawit	61.900	Ha	63.554		63.833		64.790		65.762		66.740		67.750		67.750		
		- Luas Lahan Karet	14.800	Ha	14.030		9.821		9.826		9.831		9.836		9.841		9.841		
		- Luas Lahan Kelapa Dalam	54.730	Ha	54.537		55.183		55.456		55.736		56.014		56.294		56.294		
		- Luas Lahan Kopi	3.025	Ha	2.873		3.119		3.166		3.213		3.262		3.310		3.310		
		- Luas Lahan Pinang	10.900	Ha	10.524		10.484		10.790		11.122		11.450		11.800		11.800		
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan	Meningkatnya Koordinasi antara penyuluh dan instansi terkait	100	%			100	154.310.000	100	75.310.000	100	77.560.300	100	79.896.379	100	82.293.270	100	400.370.040	Bidang Penyuluh
	Program Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	menurunkan angka kematian ternak (%)	2	%	2	556.071.000	1,5	562.149.000	1,8	490.181.930	1,7	540.108.700	1,8	565.240.892	1,5	562.942.491	1,5	3.312.681.201	Bidang Peternakan
	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	meningkatkan populasi dan produksi hewan ternak sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam, broiler, ayam buras, dll		ekor,kg		833.778.000	-	832.270.000	-	1.226.174.000	-	2.342.482.700	-	2.478.656.835	-	2.614.576.177	-	16.265.937.712	Bidang Peternakan
		- Produk Daging Sapi	136.150	kg	130.310		205.050		201.371		207.100		300.143		300.205		300.205		
		- Produk Daging Kerbau	12.345	kg	9.219		12.844		13.101		13.363		15.630		15.903		15.903		
		- Produk Daging Kambing	53.600	kg	22.748		27.256		27.801		28.307		28.924		29.503		29.503		
		- Produk Daging Domba	540	kg	628		562		575		584		590		606		606		
		- Produk Daging Unggas	2.213.127	kg	3.251.718		2.331.066		2.378.000		2.420.170		2.475.444		2.524.952		2.524.952		
		- Populasi Sapi	7.103	ekor	8.610		8.380		8.507		8.728		8.902		9.081		9.081		
		- Populasi Kerbau	607	ekor	675		717		740		771		780		811		811		
		- Populasi Kambing	40.100	ekor	71.580		48.002		48.550		48.910		49.228		49.370		49.370		
		- Populasi Domba	634	ekor	750		750		816		845		865		890		890		
		- Populasi Unggas	913.464	ekor	1.810.070		1.080.095		1.054.080		1.211.753		1.270.340		1.335.957		1.335.957		

Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Kondisi Capaian Awal RPJMD	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)												Kondisi Kinerja pada akhir periode		Pelaksana Eksekusi II
					Target 2016	Target 2016 (Rp.)	Target 2017	Target 2017 (Rp.)	Target 2018	Target 2018 (Rp.)	Target 2019	Target 2019 (Rp.)	Target 2020	Target 2020 (Rp.)	Target 2021	Target 2021 (Rp.)	Target	Target (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	jumlah kelompok peternak yg menerapkan teknologi peternakan	30	KT	10	118.514.600	2	67.400.000	2	89.431.270	2	72.902.834	2	76.547.075	2	80.375.374	20	485.011.653	Bid Peternakan/Bid Sarana Prasarana
	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	meningkatnya kapabilitas dan kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan lembaga/lembaga petani pada komoditi unggulan	5	komoditi	5	122.890.000	5	313.380.500	5	287.534.550	5	296.150.287	5	305.034.705	5	314.185.839	5 komoditi	1.639.095.021	Bid Sarana Prasarana/Bid Penyuluhan
	Program Pengembangan Data/Informasi	tersedianya data perkebunan dan Peternakan yg valid dan up to date	100	%	100	594.332.940	100	654.145.000	100	624.336.790	100	643.868.913	100	662.360.980	100	682.231.800	100	3.800.448.300	Sekretariat/Bid Penyuluhan/Bid Peternakan
Total						4.827.082.148		5.875.728.050		7.015.010.817		10.140.798.293		10.686.119.321		10.298.787.247	-	48.748.524.004	

Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. TANJUNGPINANG
TAHUN 2016-2021

Uraian Wajib : Beranja Rutin

Tujuan Strategis (TS)	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis (IKSS)	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Kondisi Capaian Awal (PJM0)	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)										Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA SIMD		Pelaksana Eselon III			
							Target 2016	Target 2016 (Rp.)	Target 2017	Target 2017 (Rp.)	Target 2018	Target 2018 (Rp.)	Target 2019	Target 2019 (Rp.)	Target 2020	Target 2020 (Rp.)	Target 2021	Target 2021 (Rp.)		Target Kinerja	Target (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Terselenggaranya tata pemerintahan yg baik, bersih, efisien, berkeadilan, transparan dan profesional			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Intensitas dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran	100	%	100	637,329,228	100	634,136,899	100	1,253,583,987	100	1,313,403,728	100	1,448,909,276	100	1,514,783,303	100	6,802,244,933	Sekretariat	
			Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	100	%	100	5,362,500	100	5,400,000	100	4,080,000	100	4,335,500	100	4,836,845	100	4,961,424	100	28,744,269		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	12	8,106,476	12	102,800,000	12	143,000,000	12	147,200,000	12	161,708,700	12	166,269,961	12	756,165,137		
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya honorarium jasa ahli keuangan	1	paket	1	141,400,000	1	130,700,000	1	102,500,000	1	107,625,000	1	113,008,250	1	118,698,503	1	683,887,813		
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	12	bulan	12	22,362,300	12	19,737,000	12	26,047,057	12	21,849,420	12	22,101,891	12	23,208,888	12	128,504,685		
			Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	12	111,786,650	12	76,147,000	12	118,648,200	12	124,580,810	12	130,809,041	12	137,380,125	12	696,322,223		
			Penyediaan barang cetak dan penggandaan	tersedianya bahan cetak dan penggandaan	12	bulan	12	13,125,000	12	17,250,000	12	17,250,000	12	18,112,500	12	19,018,125	12	19,988,031	12	104,724,958		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik	12	bulan	12	6,842,300	12	16,882,000	12	12,152,500	12	12,750,440	12	13,308,462	12	14,068,385	12	78,584,087		
			Penyediaan bahan bacaan dan perbaikan perustan/undangan	tersedianya bahan bacaan dan perbaikan perustan/undangan	1	paket	1	12,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,300,000	1	8,615,000	1	8,945,750	1	43,883,750		
			Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum	12	bulan	12	23,025,000	12	19,448,000	12	27,720,000	12	23,108,000	12	30,561,300	12	32,089,389	12	161,951,685		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terpelaksanakannya rapat koordinasi dan konsultasi	12	bulan	12	293,300,300	12	180,000,000	12	802,225,000	12	842,336,250	12	884,453,063	12	928,675,716	12	3,927,969,328		
			Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	tersedianya honorarium jasa ahli teknis perkantoran	12	bulan										12	72,800,000	12	145,200,000			
Terselenggaranya tata pemerintahan yg baik, bersih, efisien, berkeadilan, transparan dan profesional			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi	95%	%	95	257,804,280	95	544,508,890	95	284,288,000	95	388,676,908	95	376,876,280	95	297,387,588	95	2,908,164,128	Sekretariat/ Sarana prasarana	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	terlaksanakannya pengadaan perlengkapan gedung kantor								25,880,000		5,600,000		5,500,000				35,580,000		
			- AC		17	unit								5,000,000	1	5,500,000			2	10,500,000		
			- Gorden			Paket						25,000,000								25,000,000		
			Pengadaan peralatan gedung kantor	terlaksanakannya pengadaan peralatan gedung kantor				22,197,500		6,008,800		18,968,000		22,900,000		22,900,000					92,197,500	
			- laptop		7	unit		22,197,500				18,000,000		10,000,000	1	10,000,000			5	52,197,500		
			- printer		12	unit									2				4			
			- Stik cabinet		9	unit								4	12,000,000				8	24,000,000		
			- Meubelur UPT Dinas			paket									2	50,000,000			2	50,000,000		
			- Jaringan Internet dan Router			unit			1	6,000,000										6,000,000		
			Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terlaksanakannya pemeliharaan kendaraan operasional	26	Unit	26	300,446,780	93	403,500,000	48	249,200,000	48	258,676,000	48	264,376,280	48	272,307,588	311	1,648,506,828		
			Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	terlaksanakannya pemeliharaan peralatan gedung kantor																		
			- Pemeliharaan AC, Komputer, Printer		55	unit		17,500,000	55	26,750,000	55	28,250,000	55	29,882,500	55	31,148,625	55	32,792,808	275	166,011,031		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	terlaksanakannya gedung kantor	100	%	100	34,980,000	100	136,000,000	100		100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	600	244,980,000		
			- Perencanaan dan Pengawasan							15,000,000												
			- Pemeliharaan rutin gedung kantor UPT			unit				40,000,000				3	15,000,000	3	15,000,000	3	88,000,000			
			- Pemeliharaan rutin gedung kantor Dinas			paket				80,000,000				1	10,000,000	1	10,000,000	1	310,000,000			

Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

Tujuan Strategis (TS)	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis (IKSS)	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Kondisi Capaian Awal RPJMD	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)													Kondisi Kinerja pada akhir periode		Pelaksana Eselon II
							Target 2016	Target 2016 (Rp.)	Target 2017	Target 2017 (Rp.)	Target 2018	Target 2018 (Rp.)	Target 2019	Target 2019 (Rp.)	Target 2020	Target 2020 (Rp.)	Target 2021	Target 2021 (Rp.)	Target	Target (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Terwujudnya tata pemerintahan yg baik, bersih, efisien, berkeadilan, transparan dan profesional			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	100%		100	34.917.500	100	28.875.000	100	31.125.000	100	34.237.500	100	37.661.250	100	41.427.375	100	208.243.625	Sekretaris	
			Pengadaan pelayanan dinas beserta perlengkapan	terlaksananya pengadaan pelayanan dinas beserta perlengkapannya	23	mal	23	34.917.500	77	28.875.000	89	31.125.000	77	34.237.500	77	37.661.250	77	41.427.375	400	208.243.625		
Terwujudnya tata pemerintahan yg baik, bersih, efisien, berkeadilan, transparan dan profesional			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS	80%	%	78	25.000.000	88	25.000.000	85	15.000.000	88	15.000.000	95	15.000.000	100	15.000.000	87	110.000.000	Sekretaris	
			Pengembangan SDM	jumlah PNS yg mengikut pelatihan/lokal	5	org	5	25.000.000	5	25.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	22	110.000.000
Urutan Pilihan : Pertanian																						
Tujuan Strategis (TS)	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis (IKSS)	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Kondisi Capaian Awal RPJMD	Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)													Kondisi Kinerja pada akhir periode		Pelaksana Eselon II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
7.3 Meningkatkan Pengabdian Agribisnis Perkebunan serta Pengabdian Sumber Daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dengan Pemanfaatan IPTEK	SS 7	IKSS 3.5 Promosi dan Publikasi Hasil Produk Unggulan Perkebunan	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Perkebunan	tergambutnya promosi produk unggulan perkebunan	4	kal	4	95.281.500	3	118.040.000	2	68.970.000	2	75.967.000	2	83.453.700	2	91.790.070	15	533.411.270	Bid Perkebunan/Bid Penyuluh	
			Forum atau hasil produk perkebunan	terlaksananya publikasi dan promosi produk unggulan daerah	4	kal	4	95.281.500	2	118.040.000	2	68.970.000	2	75.967.000	2	83.453.700	2	91.790.070	14	533.411.270		
7.4 Terselenggaranya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkebunan dan Peternakan	SS 9	IKSS 4.1 Terbangunnya Jalan Produksi/Perkebunan (Act)	Program Peningkatan Pemasaran Teknologi Pertanian/Perkebunan	kelompok tani yg memasarkan teknologi perkebunan dan Peternakan	20 MT		0	272.201.000	18	396.000.000	18	296.560.000	18	1.794.700.000	18	1.896.028.000	18	2.003.627.500	56	6.613.188.500	Bid Sarana prasarana	
			Pengadaan Prasarana dan Sarana Perkebunan	terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana perkebunan				272.201.000		396.000.000		296.560.000		1.794.700.000		1.896.028.000		2.003.627.500		6.613.188.500		
		IKSS 4.2 Jumlah Kelompok Tani yg menggunakan Fasilitas untuk Budidaya dan Dauru Dauru	- Sarana tani jarak - Mesin Penggali Pasca Panen - Mesin Coker - Peralatan Labor dan lainnya - Biogas - Jalan Produksi Perkebunan			kal		100	150.000.000	700	150.000.000	700	185.000.000	700	181.500.000	700	199.000.000	500	848.150.000			
						Unit		8	84.000.000	2	26.000.000	2	30.800.000	2	33.880.000	2	37.288.000	14	213.948.000			
						Unit				2	60.000.000	2	66.000.000	2	72.000.000	2	78.000.000	8	278.480.000			
						Unit				1	3.000.000	1	3.300.000	1	3.630.000	1	3.993.000	4	13.023.000			
						Unit				1	40.000.000	1	48.580.000	1	53.000.000	1	58.250.000	5	228.650.500			
						Km						5	1.484.800.000	5	1.558.080.000	5	1.635.118.000	15	4.877.778.000	APBN / APBD		

Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

T.1 Meningkatkan Produktivitas Perkebunan serta Peningkatan Pengelolaan Lahan Produktif Perkebunan	SS.1 Meningkatkan Produktivitas Perkebunan	IKSS 1.1 Produk Komodi Perkebunan (Jas) (1) Sawit (2) Karet (3) Kelapa (4) Pinang (5) Kopi	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Meningkatnya produksi (ton) dan Luas Lahan (Ha) komoditi unggulan: kopikaret,sawit,pinang,karet lapa dalam		Produktif = Ton, Luas Lahan = Ha	1,333,262,189	1,803,505,500	2,298,831,250	2,624,525,320	2,722,447,850	1,806,237,580		12,468,626,841	Sidang Perkebunan					
	SS.2 Meningkatkan Pengelolaan Lahan Produktif Perkebunan	IKSS 1.2 Lahan Perkebunan (Ha) (1) Sawit (2) Karet (3) Kelapa (4) Pinang (5) Kopi	Pengembangan Jaringan Irigasi Lahan Perkebunan (TAM)	Saw lahan irigasi TAM	100	Ha	173	141,938,550	100	116,200,000	100	135,230,000	100	141,901,500	100	149,001,075	100	156,545,625	673	842,989,754
			Pemeliharaan Lajutan Kebun Percontohan Kopi Libukom	berpeliharanya kebun percontohan kopi LIBUKOM	2	Ha			5	81,600,000	5	60,100,200	5	83,105,200	5	86,260,526	5	69,573,550	25	320,639,500
			Intensifikasi Kebun Kopi Rakyat	intensifikasi lahan kopi	250	Ha	90	255,508,800	50	144,600,000	50	145,938,000	50	153,406,140	50	158,008,324	50	158,008,324	208	860,458,264
			Pemeliharaan Blok Penghasil Tropis (BPT) Kelapa, Pinang dan Kopi Libukom	berpeliharanya BPT Kelapa pinang dan kopi libukom				184,807,000		124,947,000		116,161,000		175,889,000		121,482,500		127,525,128		784,581,880
			- Kelapa		3717	PK	3717			3717		3717		3717		3717		3717		22,302
			- Pinang		250	PP	250			250		250		250		250		250		1,500
			- Kopi Libukom		30	Ha	30			30		30		30		30		30		180
			Pembibitan Kelapa Sawit	bersedanya bibit kelapa sawit yg bermutu		kecamatan	10,000	280,001,300	7,500	325,000,000	7,500	306,501,400	10,000	312,631,428	10,000	318,884,087	10,000	325,261,738	85,000	1,384,279,932
			Pencegahan, Pengendalian Kebakaran Lahan, Kebun dan Korfid Lahan Perkebunan	berlakukannya pencegahan dan pengendalian kebakaran dan korfid lahan	13	kecamatan	13	152,591,000	13	131,300,000	13	133,926,000	13	136,804,520	13	139,336,610	13	139,336,610	78	692,758,130
			Peningkatan, Pembinan, Pengawasan Pupuk dan Pestisida	berlakukannya pembinan, pengawasan pupuk dan pestisida	13	kecamatan	13	40,335,000	13	46,065,000	13	57,156,300	13	56,336,026	13	59,496,527	13	59,496,527	78	271,402,953
			Pembinaan Lintas Sektoral	pengadaan bantuan lintas sektoral	2	Desa		102,258,100	2	86,980,000	2	67,480,600	2	88,830,212	2	70,206,815	2	71,670,963	10	465,369,681
			- Pelatihan Dinamika Kelompok					50		50		50		50		50		50		250
			- Pengadaan bibit unggul tanaman					1		1		1		1		1		1		5
			- Pengadaan pupuk dan obat tanaman					1		1		1		1		1		1		5
			Pengendalian Hama Penyakit Tanaman	bersedanya serangan DPT kebun rakyat	100	Ha		74,865,000	100	119,596,000	200	106,388,000	200	108,522,900	200	110,693,568	200	112,907,225	900	632,978,483
			Peningkatan Perintangan Usaha Perkebunan	berlakukannya pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan	30	Lokasi	30	151,975,500	30	87,310,000	30	69,660,000	30	81,449,600	30	83,293,294	30	65,182,003	186	486,883,737
			Pemeliharaan Lajutan Kebun Percontohan Kelapa Sawit dan Kebun Entas	berpeliharanya kebun percontohan kelapa sawit dan kebun entas	9	Ha	9	105,010,800	9	125,000,000	9	136,943,000	9	142,320,150	9	149,438,158	9	156,907,985	54	845,118,073
			Revisi/asi kebun Kopi Libukom	luas lahan pemetaan kopi libukom		Ha			15	142,737,500	100	834,000,000	100	867,360,000	100	902,054,400			315	2,746,211,900
			fasilitasi Pemetaan kebun Kelapa Sawit	luas lahan pemetaan kelapa sawit		Ha		800	62,560,000	500	151,715,000	500	159,300,750	500	167,265,788	500	175,629,677	2.800	776,470,814	
			Pemeliharaan Demplot Kelapa Dalam	berlakukannya demplot kelapa dalam		Ha			10	136,480,000	10	143,304,000	10	143,304,000	10	150,469,200	10	157,960,600	40	588,245,860
			Pemetaan kebun karet rakyat	luas lahan pemetaan karet		Ha					50	100,000,000	50	105,000,000	50	110,250,000	150	115,250,000		315,250,000

Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

Tujuan Strategis (TS)	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis (IKSS)	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan (Output)	Kondisi Capaian Awal (RUMD)	Satuan	Aksi Anggaran (Rp.)										Kontak Kinerja pada akhir periode		Pelaksanaan Eselon II		
							Target 2016	Target 2016 (Rp.)	Target 2017	Target 2017 (Rp.)	Target 2018	Target 2018 (Rp.)	Target 2019	Target 2019 (Rp.)	Target 2020	Target 2020 (Rp.)	Target 2021	Target 2021 (Rp.)		Target	Target (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
T.3 Meningkatkan Pengalihan Agribisnis Perkebunan serta Peningkatan Sumber Daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dengan Pemanfaatan IPTEK	SS 6 Meningkatkan SDM Petaka Perkebunan dan Peternakan	IKSS 2.4 Koordinasi antar penyuluh dan instansi terkait	Program Pembinaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan	Meningkatnya Koordinasi antara penyuluh dan instansi terkait	100	%			100	154,310,000	100	75,310,000	100	77,560,100	100	70,896,379	100	82,293,270	100	469,375,940	Sidang Penyuluh
			Pelaksanaan Koordinasi Penyuluh Bidang Perkebunan/Peternakan	terlaksananya koordinasi penyuluh perkebunan/peternakan	12	kali			12	154,310,000	4	75,310,000	4	77,560,100	4	70,896,379	4	82,293,270	28	469,375,940	
T.2 Meningkatkan Produktivitas Ternak dan Populasi Ternak	SS 5 Meningkatkan angka kematian ternak	IKSS 2.4 Persentase kematian ternak (%)	Program Penanganan Penyakit dan Penanggulangan Penyakit Ternak	menurunnya angka kematian ternak (%)	2	%	2	586,071,000	1.3	502,149,000	1.3	408,181,930	1.7	548,196,708	1.8	505,249,000	1.5	502,942,491	1.58	3,312,681,291	Sidang Peternakan
			Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak ternak ternak	jumlah ternak yg terlayak pengobatan PKB pemerintah dan spesimen, nabatasa, eliminasi				246,345,000		208,800,000		423,481,930		438,185,708		440,250,762		462,728,284		2,265,751,704	
			- Pengobatan		ekor	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	12,000	-	
			- PKB		ekor	1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000	6,000	-	
			- Pemeriksaan Spesimen		ekor	1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000	6,000	-	
			- Vaksinasi		ekor	2500		2500		2500		2500		2500		2500		2500	15,000	-	
			- Eliminasi		ekor	100		100		100		100		100		100		100	600	-	
			Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	terlaksananya pengawasan perdagangan ternak dan sertifikasi	12	bulan	12	81,480,000	12	86,385,000	12	74,700,000	12	75,941,000	12	79,349,230	12	81,628,707	12	492,346,937	
			Pembelian dan Pendistribusian Obat-obatan Ternak, Vaksin dan Parasit Medis	tersedianya obat-obatan ternak dan parasit medis veteriner		paket	1	216,248,000	2	209,909,000	2									426,245,000	
			Sosialisasi penyakit zoonosis	terlaksananya sosialisasi penyakit zoonosis		kali							4	35,000,000	4	36,750,000	4	38,587,500	12	110,337,500	
T.2 Meningkatkan Produktivitas Ternak dan Populasi Ternak	SS 3 Meningkatkan Produktivitas Ternak	IKSS 2.1. Produktivitas Ternak (kg/1/ sapi/2) Kerbau (3) kambing (4) Domba (5) Unggas	Peningkatan Produktivitas Hasil Peternakan	meningkatkan populasi dan produktivitas hewan ternak sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ayam broiler/ayam sukar,itik		Populasi + ekor/produktif = kg		813,778,000		832,278,000		1,228,174,000		1,342,482,708		2,476,658,635		2,814,576,177		10,305,937,712	Sidang Peternakan
			pereliharaan ternak sapi bakalan	populasinya sapi bakalan		ekor					20	350,000,000	20	350,000,000	20	430,000,000	20	450,000,000	80	1,550,000,000	
			Lomba agribisnis peternakan	terlaksananya lomba agribisnis peternakan		kali			1	70,870,000	1	43,635,000	1	45,816,750	1	48,107,588	1	50,512,987	5	263,942,304	
			Pengembangan Insentif Bantuan Sirkulasi Bant	jumlah sapi B		ekor	1000	219,250,000	1000	230,800,000	1000	242,340,000	1000	254,457,000	1000	267,119,850	1000	280,538,843	6,000	1,401,565,633	
			Penyangga Hati Besar Kasempatan	jumlah sapi B		ekor	1000	111,985,000	1000	245,100,000	500	108,400,000	500	113,820,000	500	119,511,000	500	125,486,550	4,000	823,382,550	
			Pusat Pengembangan Ika Daerah	tersedianya daging untuk konsumsi hari besar keagamaan		kg	600	122,150,000	600	137,100,000	600	156,100,000	600	164,885,000	600	175,097,750	600	185,652,638	4,800	1,100,185,388	
			Pengembangan ternak cumenana	terlaksananya pengembangan ternak cumenana		ekor		233,806,000	300	143,400,000	500	218,980,000	500	230,907,450	500	242,515,823	500	254,641,614	2,300	1,325,101,886	
			Pengembangan ternak cumenana	terlaksananya pengembangan ternak cumenana		ekor							50	772,500,000	50	796,675,000	50	819,545,250	150	2,387,120,250	APBN / APBD I
			Pengendalian Perawatan Ternak Betina Produktif	tersedianya perawatan ternak betina produktif		%					30%	66,730,000	20%	70,086,500	20%	75,568,825	20%	77,248,316	1	287,614,641	
			Pengembangan sentra peternakan	terlaksananya sosialisasi		KT		130,705,000					1	300,000,000	1	315,000,000	1	330,750,000	3	1,076,455,000	

Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

Tujuan Strategis (TS)	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis (IKSS)	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) Sasaran Kegiatan (Output)	Kondisi Capaian Awal (RPJMD)	Satuan	Rincian Anggaran (Rp.)											Kondisi Kinerja pada akhir periode		Pelaksana Eselon II		
							Target 2016	Target 2016 (Rp.)	Target 2017	Target 2017 (Rp.)	Target 2018	Target 2018 (Rp.)	Target 2019	Target 2019 (Rp.)	Target 2020	Target 2020 (Rp.)	Target 2021	Target 2021 (Rp.)	Target		Target (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
T.3 Meningkatkan Pengelolaan Agribisnis Perkebunan serta Pengelolaan Sumber Daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dengan Pemanfaatan IPTEK	SS.6 Meningkatnya SDM Petani Usaha Perkebunan dan Peternakan	IKSS 3.3 Jumlah Kelompok Peternak yg menerapkan Teknologi Peternakan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	jumlah kelompok peternak yg menerapkan teknologi peternakan		30 KT	10	118.514.000	3	87.408.000	2	68.431.270	2	72.902.834	2	76.547.075	2	80.375.374	28	485.181.053	Bid Peternakan/Bid Sarana Prasarana	
			Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)	terlaksananya pelatihan TTG		KT	10	118.514.000	10	87.408.000	10	68.431.270	10	72.902.834	10	76.547.075	10	80.375.374	60	485.181.053		
T.3 Meningkatkan Pengelolaan Agribisnis Perkebunan serta Pengelolaan Sumber Daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dengan Pemanfaatan IPTEK	SS.6 Meningkatnya SDM Petani Usaha Perkebunan dan Peternakan	IKSS 3.1 Jumlah Petani Perkebunan yg mengikut Pelatihan Sistem Ketersamaan Ekonomi (SKE)	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	meningkatnya kepatuhan dan kerjasama petani dengan lembaga/instansi petani pada komoditi unggulan		5 komoditi	5	122.800.000	5	313.388.950	5	287.524.550	5	296.130.287	5	305.034.795	5	314.185.839	5 komoditi	1.838.085.821	Bid Sarana Prasarana/Bid Penyuluh	
			Pertinaan Kelenyangan dan Kemahiran Usaha Perkebunan	terbinanya asosiasi dan terjelanya kerjasama petani		as	-	5	80.000.000	5	47.750.000	5	49.182.500	5	50.697.975	5	52.177.714	25	258.768.150			
			Pelatihan Pemberdayaan Petani Sistem Ketersamaan Ekonomi (SKE)	terlaksananya pelatihan SKE		Org	-	125	86.174.500	125	62.774.550	125	85.257.787	125	87.815.520	125	90.449.386	625	441.412.330			
			Pertinaan dan inventarisasi kebun sawit swadaya	operasinya STD-B untuk kebun sawit swadaya		ka	7000	122.800.000	700	158.215.000	700	157.000.000	700	161.710.000	700	166.561.300	700	171.558.130	4.500	937.844.430		
T.3 Meningkatkan Pengelolaan Agribisnis Perkebunan serta Pengelolaan Sumber Daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dengan Pemanfaatan IPTEK	SS.6 Tersedianya Data dan Informasi Perkebunan dan Peternakan	IKSS 3.2 Tersedianya data yg valid dan up to date	Program Pengembangan Data/Informasi	tersedianya data perkebunan dan peternakan yg valid dan up to date		100%	100	554.302.040	100	634.148.000	100	624.338.750	100	643.888.913	100	662.368.980	100	682.231.808	100	3.806.448.392	Sekretariat/Bid Penyuluh/Bid Peternakan	
			Pengolahan Data Statistik Perkebunan dan Peternakan	tersedianya data statistik perkebunan dan peternakan		40	40	200.442.700	40	146.630.000	40	170.545.000	40	175.881.350	40	180.931.191	40	186.359.126	240	1.069.583.987		
			Penyediaan Informasi Perkebunan	tersedianya dokumen informasi pasar perkebunan		1	1	30.624.000	1	86.982.750	1	86.982.750	1	89.803.563	1	92.201.669	1	95.060.419	6	454.514.401		
			Sinkronisasi Program Perencanaan Perkebunan dan Pelaporan	tersedianya Dokumen RENJA, RKA dan Dokumen SAGP		4	4	83.105.240	4	134.515.000	4	75.140.000	4	77.394.205	4	79.716.026	4	82.107.507	24	501.977.973		
			Pengadaan Teras Peternak	terlaksananya pusat ternak ibarah		1	1	143.800.000	1	147.600.000	1	168.185.000	1	174.280.550	1	179.486.367	1	184.873.017	5	906.406.934		
			Penyusunan Laporan Informasi Pasar Peternakan	tersedianya dokumen informasi pasar peternakan		1	1	117.985.000	1	144.575.000	1	122.475.000	1	128.140.250	1	130.333.728	1	133.831.730	6	774.919.717		
Total								4.821.882.146	5.873.729.858	7.918.019.817	10.148.790.383	10.686.115.321	10.266.787.387	10.266.787.387	10.266.787.387	10.266.787.387	10.266.787.387	10.266.787.387	10.266.787.387	10.266.787.387	48.748.524.084	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan **Indikator Kinerja** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian *Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2016- 2021* sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian *tujuan* dan *sasaran RPJMD*.

Indikator Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2016 - 2021 dapat dilihat pada Tabel 7.1. dibawah ini, yaitu :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016-2021
Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Produksi Sawit (Ton)	131,234	131,068	136,535	139,267	142,051	144,893	147,790	147,790
2	Produksi Karet (Ton)	14,806	6,575	4,144	4,913	4,915	4,918	4,921	4,921
3	Produksi Kelapa (Ton)	54,908	50,837	56,941	58,080	59,241	60,428	61,635	61,635
4	Produksi Kopi (Ton)	1,214	1,323	1,263	1,288	1,314	1,340	1,367	1,367
5	Produksi Pinang (Ton)	9,882	9,426	11,432	11,662	11,895	12,133	12,375	12,375

Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Luas Lahan Sawit (Ha)	61,960	63,554	63,833	64,790	65,762	66,749	67,750	67,750
7	Luas Lahan Karet (Ha)	14,806	14,035	9,821	9,826	9,831	9,836	9,841	9,841
8	Luas Lahan Kelapa (Ha)	54,730	54,537	55,183	55,468	55,736	56,014	56,294	56,294
9	Luas Lahan Kopi (Ha)	3,028	2,873	3,119	3,166	3,213	3,262	3,310	3,310
10	Luas Lahan Pinang (Ha)	10,989	10,524	10,484	10,798	11,122	11,456	11,800	11,800

Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	Produksi Daging Sapi (kg)	336,156	310,310	285,658	291,371	297,199	303,143	309,205	309,205
12	Produksi Kerbau (kg)	12,345	9,218	12,844	13,101	13,363	13,630	13,903	13,903
13	Produksi Kambing (kg)	53,695	22,748	27,256	27,801	28,357	28,924	29,503	29,503
14	Produksi Domba (kg)	540	628	562	573	584	596	608	608
15	Produksi Unggas (kg)	2,219,127	3,251,718	2,331,966	2,378,600	2,426,179	2,475,444	2,524,952	2,524,952

Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	Populasi Sapi (ekor)	7,193	8,616	8,389	8,557	8,728	8,902	9,801	9,801
17	Populasi Kerbau (ekor)	607	675	717	740	771	780	811	811
18	Populasi Kambing (ekor)	40,195	71,586	48,002	48,550	48,910	49,228	49,378	49,378
19	Populasi Domba (ekor)	634	750	790	816	845	865	890	890
20	Populasi Unggas (ekor)	913,464	1,819,070	1,099,095	1,054,050	1,211,753	1,272,340	2,335,957	2,335,957

BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis Dinas yang memuat *Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan* merupakan acuan bagi pelaksanaan program pembangunan Perkebunan dan Peternakan. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku pembangunan di sektor Perkebunan dan Peternakan. Dengan dijalkannya Renstra ini secara konsisten, diharapkan akan tercipta kesatuan gerak dari *stakeholders* pembangunan perkebunan dan peternakan. Komunikasi yang intensif yang didasari semangat kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan perkebunan dan peternakan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam, Forum SKPD, *Stakeholders* menyampaikan masukan tentang prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan. Rancangan RENJA tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbang Kabupaten. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbangkab untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Pimpinan Satuan Kerja harus mempedomi Renstra Dinas dan hasil Musrenbangkab/RKPD final. Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan menjadi dasar evaluasi dan penyusunan Laporan Pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sebagai Dokumen Perencanaan Jangka Menengah, Renstra ini harus dijadikan Pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas serta rencana-rencana Kerja Bidang dan unit Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena Rencana Strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengarahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat kita perlukan, agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian.

Kuala Tungkal,

2018

**Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung jabung Barat**

Ir. Melam Bangun

Pembina Utama Muda

NIP. 19611215 199303 1 003